



*Excellent, Entrepreneur, Global*

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS DAN AKADEMI BOROBUDUR  
2021**



**LJM-UNBOR JL. RAYA KALIMALANG NO. 1 JAKARTA TIMUR  
LJM@BOROBUDUR.AC.ID**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Marilah kita ucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah *subhanahu wa taala* dengan selesainya penulisan Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi di lingkungan Universitas dan Akademi Borobudur. Melalui petunjuk dan rahmat-Nya, tim kerja telah dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyiapkan pedoman ini.

Keberadaan pedoman ini sangat penting bagi UPPS untuk pengembangan kurikulum program studi yang menjadi pengelolaannya secara periodik. Melalui pedoman ini desain kurikulum program studi yang dikembangkannya akan dapat memenuhi ketentuan standar mutu sebagaimana yang ditetapkan oleh Lembaga Jaminan Mutu Universitas Borobudur. Melalui ketentuan yang diatur dalam pedoman ini, langkah kerja sebuah tim kerja yang diangkat oleh pimpinan menjadi lebih terarah pada desain kurikulum yang diharapkan oleh institusi.

Dalam pedoman ini diatur tentang filosofi dan konsep dasar kurikulum dalam sistem pendidikan. Jenis kurikulum dalam konsepsi ilmiah dideskripsikan secara singkat sebagai upaya pengayaan pengetahuan tentang kurikulum bagi pimpinan. Format kurikulum yang digunakan di Universitas dan Akademi Borobudur juga telah dideskripsikan secara rinci. Pada bagian akhir dari pedoman ini juga disebutkan kebijakan monitoring dan evaluasi kurikulum yang seharusnya dilakukan oleh fakultas, akademi, dan/atau UPPS terkait dengan pelaksanaan kurikulum secara operasional di program studi.

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini, setiap UPPS diharuskan untuk menyusun kembali kurikulum program studi yang menjadi binaannya. Selanjutnya, dokumen kurikulum program studi tersebut diajukan kepada Rektor untuk mendapatkan pengesahan. Dengan ditetapkannya kurikulum program studi yang baru tersebut kegiatan akademik dalam bentuk perkuliahan dosen dan/atau pembelajaran mahasiswa menjadi sah.

Atas nama pimpinan Universitas Borobudur, disampaikan ucapan terima kasih kepada semua anggota tim kerja yang telah menyelesaikan penyusunan pedoman penyusunan kurikulum program studi ini. Semoga upaya, tenaga, waktu, dan karya yang sudah diinvestasikannya menumbuhkan kebaikan dan perbaikan, khususnya dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran mahasiswa di Universitas dan Akademi Borobudur.

Jakarta, 2 Oktober 2021

Rektor Universitas Borobudur

Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, MSc

## DAFTAR ISI

Keputusan Rektor .....	i
Kata Pengantar .....	iii
Daftar isi .....	v
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Dasar hukum .....	3
1.3. Kebijakan Universitas Borobudur .....	4
BAB II. KONSEPSI KURIKULUM .....	6
2.1. Definisi kurikulum.....	7
2.2. Kurikulum inti .....	9
2.3. Kurikulum berbasis kompetensi .....	11
2.4. Kurikulum berbasis capaian pembelajaran ( <i>Learning outcome</i> ) .....	14
2.5. Kurikulum merdeka belajar.....	16
BAB III. PENGEMBANGAN KURIKULUM .....	18
3.1. Pengelolaan kurikulum.....	18
3.2. Prosedur pengembangan kurikulum.....	20
3.3. Kurikulum merdeka belajar.....	24
3.4. Tim penyusun kurikulum .....	25
BAB IV. DOKUMENTASI DAN STRUKTUR DESAIN KURIKULUM ...	26
4.1. Dokumentasi kurikulum .....	26
4.2. Pemberlakuan Kurikulum.....	41
4.3. Administrasi pengesahan kurikulum .....	42
BAB V: MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM .....	43
5.1. Monitoring kurikulum .....	43
5.2. Evaluasi kurikulum.....	45
5.3. Pelaporan .....	47
BAB VI: Penutup.....	48

# **BAB I: PENDAHULUAN**

## **1. 1. Latar Belakang**

Kurikulum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknakan sebagai perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Yang perlu digaris bawahi dari definisi kebahasaan tersebut adalah bahwa kurikulum bukan ‘daftar mata pelajaran’ tetapi sebuah ‘perangkat mata pelajaran’. Namun, dalam situasi keseharian banyak pengelola dan praktisi pendidikan yang masih menganggap kurikulum sebagai daftar mata ajar dan isinya. Seringkali pada saat diminta untuk menunjukkan kurikulum program yang dikelolanya, ketua program studi menyodorkan daftar mata ajar di program studi pada setiap semester.

Arti kurikulum sebagaimana yang disebutkan dalam KBBI itu telah sejalan dengan konsepsi ilmiah tentang istilah kurikulum itu sendiri. Sebuah kurikulum program pendidikan bukan hanya sekedar daftar mata ajar tetapi memuat seluruh aspek yang terkait dengan kegiatan pembelajaran peserta didik. Sekumpulan aspek tersebut dalam istilah KBBI disebut perangkat materi ajar. Dalam kurikulum program pendidikan terdapat pemikiran filosofis yang melandasi keberadaan mata ajar; mengapa mata ajar itu harus ada dan seberapa jauh mata ajar tersebut relevan dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan.

Setiap lembaga pendidikan memiliki pemikiran filosofis yang berbeda antara satu dan lainnya, keberadaan kurikulum pendidikan yang dibangun juga berbeda. Sehingga perbedaan kurikulum yang ditawarkan pada dasarnya adalah baik dan tidak harus saling dipertentangkan. Yang penting adalah unsur intinya sama. Sebuah analigi dalam pengalaman sehari-hari, kita dapatkan variasi produk smartphone di pasar dengan bentuk, fitur, kapasitas memori, dan desain tampilan yang berbeda. Namun, platform yang dibangun sebagai smartphone tetap sama; yakni, alat berkomunikasi, mobile, produksi dan penyimpanan informasi.

Memahami makna kurikulum secara benar sangat penting bagi setiap pimpinan lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Pemahaman yang keliru akan menjadikan desain kurikulum yang dibangunnya salah; karena salah maka arah penyelenggaraan pendidikan tidak akan sampai ke tujuannya. Untuk itu, sebelum membangun sebuah kurikulum seorang harus menetapkan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuannya. Perguruan tinggi pada saat didirikan mempunyai tujuan, program studi yang diselenggarakan juga mempunyai tujuan, dan masyarakat yang ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi juga mempunyai sebuah tujuan. Semua bentuk tujuan tersebut diintegrasikan oleh pimpinan perguruan tinggi menjadi satu rumusan tujuan yang utuh. Berdasarkan rumusan tujuan tersebut kurikulum program studi didesain dan dikembangkan.

Mendesain sebuah kurikulum program studi di perguruan tinggi bukan pekerjaan yang mudah. Diperlukan pemikiran yang mendalam dan kreatif berdasarkan perspektif jamak dan bukan tunggal. Oleh karena itu, penyusunannya diperlukan kelompok kerja yang mewakili segenap anggota pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang aka mewakili perseptifnya masing-masing.

Pada kurun waktu sebelum tahun 2000, semua kurikulum program studi yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional ditetapkan secara terpusat. Misalnya, melalui Kepmen No 232/U/2000 disebutkan bahwa kurikuum inti untuk setiap program studi pada program sarjana, program magister, program doktor dan program diploma ditetapkan oleh menteri (Pasal, 11). Namun, setelah itu pemerintah tidak lagi mengurus bangunan operasional kurikulum dan menyerahkan ke perguruan tinggi dan masyarakat profesi sebagaimana yang ditetapkan dalam Kepmen No. 045/U/2002 (Pasal 6, ayat (2)). Kebijakan pengembangan kurikulum program studi oleh perguruan tinggi tetap berlaku sampai saat ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 (Pasal 38, ayat (3), Undang-undang No. 12 tahun 2012 (Pasal 35, ayat (2)).

Efek dari kebijakan pemerintah lama yang menentukan bangunan kurikulum secara total menjadikan banyak perguruan tinggi tidak memikirkan bagaimana menyusun sebuah kurikulum secara mandiri. Mereka menunggu kebijakan pemerintah dan siap melaksanakan bentuk kurikulum yang baru. Pelimpahan kewenangan untuk menyusun kurikulumnya di perguruan tinggi secara mandiri menuntut adanya pola fikir kreatif yang orisinil untuk menciptakan sebuah kurikulum yang cerdas.

Karena kesulitan dalam menglah pemikirannya, sebagian perguruan tinggi dalam membangun kurikulum program studinya dilakukan dengan mengadopsi kurikulum yang dikembangkan oleh perguruan tinggi negeri. Sebagian lain membentuk forum komunikasi program studi sejenis yang seharusnya hanya menyusun kurikulum inti sekitar 40% tetapi kebablasan mengaturnya sebesar 80%. Bahkan ada pula forum komunikasi program studi yang membangun kurikulum secara operasional dengan kesepakatan sebesar 100%. Akibatnya, perguruan tinggi sekali lagi tidak mempunyai ruang untuk berfikir membangun kurikulumnya secara total berdasarkan pola fikir kreatif yang orisinil. Efek lainnya adalah bahwa pimpinan pendidikan tinggi tidak terbiasa dengan pemikiran kurikuler, pengetahuan mereka tentang kurikulum sangat dangkal, dan bahkan sebagian tidak mengetahui filosofi pendidikan yang melandasinya.

Kurikulum bisa dianalogkan seperti menu masakan dan bagaimana cara memasaknya agar dapat menghidangkan makanan yang lezat dan memenuhi selera konsumen. Bila kita memasak menggunakan resep orang lain, dan kita memasaknya dengan cara kita sendiri dan dengan takaran bumbu yang dikira-kira, pasti kita tidak akan dapat menghasilkan masakan yang sebaik pemilik resep. Kita

pasti akan kalah bersaing dengan pemilik resep yang asli karena mereka bisa menghadirkan masakan yang jauh lebih lezat.

Mengelola program studi tetapi tidak memahami tentang konsep kurikulum untuk menghasilkan desain kurikulum yang benar sama halnya dengan mengelola rumah makan tetapi tidak memahami teknologi masak-memasak dan juga tidak memiliki menu masakan yang tepat. Oleh karena itu, ketua program studi yang menjadi pimpinan dalam penyajian layanan perkuliahan yang berkualitas bagaikan seorang ‘cook’ atau juru masak profesional. Ia memahami berbagai macam pendekatan pengembangan kurikulum, menguasai substansi kajian bidang ilmu secara luas, dan juga mempunyai pengalaman teknis mengelola kurikulum.

Dalam kaitannya dengan kenyataan di lapangan tentang pengembangan kurikulum program studi, khususnya di lingkungan Universitas Borobudur dan Akademi Borobudur dipandang perlu untuk menerbitkan pedoman pengembangan kurikulum. Pedoman yang merupakan *guidelines* atau petunjuk garis besar untuk mendesain kurikulum tersebut berisi tentang beberapa aspek yang terkait dengan kurikulum. Aspek yang dibahas di antaranya adalah filosofi dan konsep ilmiah kurikulum, kebijakan dasar pengembangannya, dan format kurikulum yang ditetapkan di Universitas Borobudur.

## **1.2. Dasar Hukum**

Kurikulum adalah unsur yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Begitu pentingnya kurikulum dalam sistem pendidikan nasional, ketentuannya disebutkan secara rinci. Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ketentuan kurikulum ditempatkan dalam satu bab tersendiri (Bab IX: Kurikulum), dan UU No. 12 tahun 2012 menempatkan ketentuan tentang kurikulum dalam sebuah sub bab; yakni, bagian ke sembilan “proses pendidikan dan pembelajaran” yang di dalamnya terdapat bahasan tentang program studi, kurikulum, bahasa pengantar, perpindahan dan penyetaraan, sumber ajar, dan lain-lainnya.

Dalam undang-undang yang disebutkan di atas, kurikulum didefinisikan secara operasional dalam ketentuan umum (UU No. 20 tahun 2003, Pasal 1; UU No. 12 tahun 2012, Pasal 35) sebagai “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.” Kurikulum program studi disusun secara mandiri oleh setiap perguruan tinggi yang mengelolanya dengan menggunakan acuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (UU No. 12 tahun 2012, Pasal 35, ayat (2)).

Berdasarkan atas definisi tersebut kurikulum di perguruan tinggi pada dasarnya adalah dokumen perencanaan kegiatan pembelajaran mahasiswa. Melalui

kegiatan perencanaan yang mantap, kegiatan pelaksanaan pengelolaan pembelajaran mahasiswa akan menjadi mantap pula. Terdapat sejumlah unsur yang menjadi obyek perencanaan pembelajaran; yakni, aspek tujuan, isi, bahan ajar, metodologi, dan evaluasi keberhasilannya. Tujuan kurikuler adalah unsur yang sangat penting dan fundamental yang melandasi semua isi kurikulum yang dibangun oleh program studi. Secara umum tujuan kurikuler sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 12 tahun 2012 adalah untuk membangun *kecerdasan intelektual, akhlak mulia* dan *keterampilan* (Pasal 35, ayat (2)). Tujuan secara khusus dengan atribut kelembagaan penyelenggara pendidikan dikembangkan oleh setiap program studi dan perguruan tinggi.

Program studi yang dikelola oleh perguruan tinggi meliputi sejumlah jenjang pendidikan dan setiap jenjang mempunyai kekhususan kualifikasi kompetensi dan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan pendidikan (Perpres No. 8 tahun 2012). Setiap kurikulum yang dikembangkan oleh perguruan tinggi juga perlu menyebutkan jenjang tersebut sehingga tujuan yang ditetapkan relevan dengan jenjangnya. Sementara itu, standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan pokok untuk pengembangan kurikulum program studi telah ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020. Melalui standar nasional pendidikan tinggi ini diharapkan tujuan pendidikan tinggi dapat terjamin pencapaiannya; mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan pengetahuan dan teknologi (Pasal 3, ayat (1)).

Mengenai tugas penyusunan kurikulum, unit kerja yang berkewajiban menyusun kurikulum di perguruan tinggi, berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 41, ayat (2a), dalam program studi. Secara lengkap disebutkan bahwa “program studi melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah.” Ataskurikulum yang dikembangkannya, program studi melaksanakan, memonitor dan mengevaluasinya secara berdisiplin.

### **1.3. Kebijakan Universitas Borobudur**

Berdasarkan pemikiran strategis dan landasan hukum yang terkait dengan kegiatan pendidikan yang disebutkan di atas, Universitas Borobudur menetapkan kebijakan pendidikan yang terkait dengan kurikulum sebagaimana yang ditetapkan dalam Statuta Universitas Borobudur tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kurikulum program studi adalah dokumen perencanaan kegiatan pembelajaran mahasiswa yang dikembangkan oleh Universitas dan Akademi Borobudur secara mandiri melalui program studi yang dikelolanya dan difungsikan sebagai dasar penetapan kebijakan akademik.

- b. Pengembangan kurikulum program studi secara teknis disusun oleh satu tim kerja yang beranggotakan pimpinan program studi, fakultas, yayasan, mahasiswa, alumni, dan pengguna jasa.
- c. Pemberlakuan kurikulum di setiap program studi ditetapkan oleh Rektor melalui sebuah keputusan dan berlaku untuk periode waktu tertentu sesuai dengan jenjang pendidikan.
- d. Pelaksanaan kurikulum dimonitor setiap semester perkuliahan dan dievaluasi setiap tahun perkuliahan; hasil evaluasi difungsikan sebagai bahan revisi kurikulum dan/atau peninjauan kurikulum.
- e. Kurikulum yang berlaku perlu dilakukan peninjauan kembali karena masa berlakunya telah habis, atau terjadi perubahan visi dan misi kelembagaan, atau terjadi kemajuan ilmu dan teknologi yang bermakna. Mekanisme peninjauan kembali mengikuti tata kerja yang diatur dalam panduan pengembangan kurikulum ini.
- e. Setiap kurikulum yang baru dikembangkan dan yang digunakan oleh program studi harus disosialisasikan secara periodik kepada dosen, mahasiswa, dan anggota pemangku kepentingan lainnya melalui media komunikasi yang efektif dan benar.
- f. Setiap pimpinan program studi diwajibkan menguasai platform ilmiah kurikulum yang terdapat di program studinya pada aspek rasional tujuan kurikuler, keberadaan mata kuliah, isi perkuliahan, metode pengajaran yang digunakan, dan prosedur evaluasi pembelajaran yang digunakan.
- g. Sebuah kurikulum dianggap sah dan dapat dilaksanakan sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di program studi apabila telah disahkan oleh Rektor melalui sebuah keputusan.





## **BAB II:**

### **KONSEPSI KURIKULUM**

Seperti yang telah disebutkan di bagian sebelumnya bahwa kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga pendidikan memerlukan bangunan kurikulum yang jelas. Unsur kejelasan kurikulum dapat ditandai dengan tujuan pendidikan yang terfokus, ketepatan media yang digunakan, keselarasan muatan isi, dan bentuk pengalaman pembelajaran yang dihadirkan. Kurikulum adalah sebuah peta jalan (*roadmap*) kegiatan pembelajaran yang mengantarkan siswa bisa sampai ke tujuan yang ditetapkan.

Sebagai sebuah peta jalan, berbagai macam bentuk kegiatan pembelajaran yang terdapat di dalam kurikulum harus saling terkait dalam sebuah ikatan yang bermakna. Tidak ada satu kegiatan yang terpisah dan tidak terkait antara satu dengan lainnya; biasanya yang menyatukannya adalah tujuan yang hendak dicapai. Misalnya, dalam sebuah kurikulum program studi Agroteknologi di pendidikan tinggi terdapat mata kuliah agama, kegiatan magang, pola pikir kewirausahaan, atau lainnya yang secara sepintas tidak terkait dengan tujuan untuk menjadi ahli dalam bidang Agroteknologi. Namun, semuanya akan menjadi jelas keterkaitannya bila dilihat dari sisi tujuan kurikuler yang ditetapkan.

Berkaitan dengan unsur yang terdapat dalam kurikulum yang begitu rumit, mengembangkan sebuah kurikulum program studi di perguruan tinggi bukan pekerjaan yang mudah. Roadmap pembelajaran mahasiswa yang benar hanya bisa disusun oleh mereka yang mengetahui ilmunya. Untuk menghasilkan sebuah desain kurikulum yang benar, seseorang harus memahami makna kurikulum itu sendiri. Kalau makna kurikulum tidak difahami, dapat diprediksikan bahwa bangunan kurikulum yang dikembangkannya tidak akan kokoh, valid, dan benar.

Terkait dengan batasan-batasan tertentu dalam membangun sebuah kurikulum, dalam kajian ilmu pendidikan, kurikulum dibahas dari sisi flosofi, teori, dan praktiknya secara mendalam. Terdapat sejumlah teori kurikulum yang disampaikan oleh sejumlah tokoh, misalnya, Beauchamp (1961), Hilda Taba (1962), Maccias (1965), Mauritz Johnson (1967), Craig Wilson (1971), Glenn Hass (1980), Jean Anyon (1982), Allan Orstein (1987), Ronald C. Doll (1988), dan lain-lainnya. Mereka menyajikan teori kurikulum berdasarkan perspektif filosofis yang mereka yakni kebenarannya dan konteks waktu di mana mereka hidup berinteraksi dengan kegiatan pengajaran. Perbedaan pandangan mereka tentang kurikulum adalah wajar seperti yang disampaikan oleh Bernice Wolfson (1985): "*Each human-being-in-the-world speaks from a unique perspective reflecting a particular history, a private construction of the world, and a personal set of beliefs and values.*" (Setiap orang akan menyuarakan keunikan prespektifnya yang mereflek-

sikan sejarah, pandangan tentang konstruksi alam, dan bentuk keyakinan dan nilai-nilai yang dianutnya.)

Yang penting untuk diketahui bahwa menyusun kurikulum itu bukan sekedar kegiatan meramu-ramu atau menciptakan kelompok mata kuliah yang ditetapkan sebagai bahan ajar secara preskriptif. Untuk menyusunnya secara benar seseorang harus memahami terlebih dahulu apa yang disebut kurikulum, unsur yang terdapat di dalamnya apa saja, strukturnya seperti apa, pendekatan mana atau teori apa yang digunakan untuk menyusunnya, dan realita obyektif peserta didiknya seperti apa. Memperhatikan hal-hal tersebut menjadi sangat penting bila kita menginginkan terciptanya bangunan kurikulum yang benar dan berkualitas tinggi.

Dalam ruang lingkup penyusunan kurikulum program studi di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (2016) menerbitkan Panduan Penyusun Kurikulum Perguruan Tinggi. Dalam dokumen tersebut disebutkan prosedur kerja dalam menyusun kurikulum yang didasarkan atas peraturan dan perundangan yang ditetapkan pemerintah.

Dengan tujuan untuk melengkapi pola pikir pengembangan kurikulum tersebut, dalam buku pedoman ini dijelaskan pula pola pikir ilmiah agar tercipta pemahaman pengembangan kurikulum program studi yang lebih komprehensif. Dalam kaitannya dengan hal itu, dibahas dalam bab ini kajian ilmiah yang terkait dengan kurikulum yang meliputi definisi kurikulum dan jenis kurikulum yang terdiri atas kurikulum inti, kurikulum berbasis kompetensi (*competency*), dan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (*learning outcome*).

## **2.1. Definisi kurikulum**

Dalam konteks pendidikan, kurikulum sering didefinisikan secara umum sebagai totalitas pengalaman siswa yang terjadi dalam sebuah proses pendidikan. Definisi yang demikian tersebut bermakna bahwa dalam kurikulum terdapat rencana pengajaran yang berurutan, apa yang dikerjakan oleh siswa, dan ukuran sejauh mana pembelajaran tersebut bisa memberikan informasi tentang tercapainya tujuan guru atau tujuan pengajaran sekolah.

Mendefinisikan kurikulum secara ilmiah pada dasarnya tidak mudah karena dimensinya yang sangat luas. Secara mendasar biasanya definisi kurikulum bertitik tolak dari dua hal; definisi pertama menganggap kurikulum sebagai dokumen perencanaan, seperti yang terdapat di definisi legal yang sudah disebutkan sebelumnya. Definisi lainnya menganggap kurikulum sebagai potret pelaksanaan kegiatan pembelajaran mahasiswa di lapangan, seperti yang disebutkan dalam definisi di atas. Terdapat pula definisi kurikulum yang mengintegrasikan antara dua perspektif di atas dengan menyatakan bahwa kurikulum adalah deskripsi

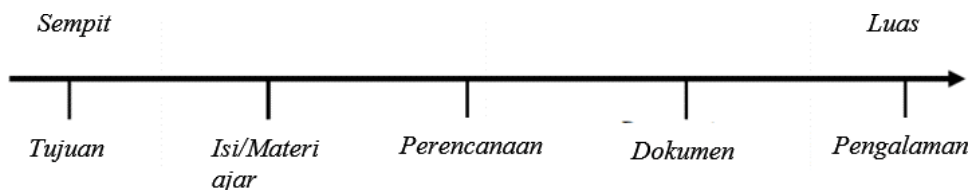
sebuah perencanaan pembelajaran dan juga sekaligus potret pembelajaran itu sendiri sebagaimana yang terjadi di lapangan.

Hilda Taba (1962) seorang pendidik, ahli kurikulum terkenal dari Amerika Serikat dan kelahiran Estonia, memberikan definisi kurikulum yang relatif lebih lengkap dengan mengatakan bahwa: "Semua kurikulum yang menggunakan desain apa saja terdiri atas sejumlah komponen; yakni, menyatakan ungkapan tujuan dan sasaran, menyajikan pilihan isi dan organisasi materi ajar, mendeskripsikan pola pembelajaran dan pengajaran, dan menyertakan program evaluasi terhadap capaiannya (*outcome*).

Sejalan dengan Taba yang disebutkan di atas, Glenn Hass (1980), pengarang buku "*Curriculum Planning: A New Approach*" mendefinisikan kurikulum sebagai pengalaman pembelajaran seseorang yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran; semuanya didasarkan atas kerangka teori, hasil penelitian terhadap praktek masa lalu, dan praktek profesional saat ini.

Dari perspektif tujuan dan isinya, Ronald C. Doll (1988), pengarang buku "*Curriculum Improvement*" menyatakan bahwa dalam sebuah kurikulum, isi dan prosesnya harus memungkinkan terciptanya pembelajaran siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan keterampilan, dan mengubah sikap, pandangan, dan nilai-nilai melalui pengawasan sekolah. Sejalan dengan hal itu Jon Wiles and Joseph Bondi (1989) menganggap kurikulum sebagai sebuah tujuan atau seperangkat nilai-nilai yang diaktifkan melalui pengembangan proses optimasi pengalaman siswa dalam kelas.

Dari berbagai ungkapan definisi kurikulum di atas, sebenarnya dapat dipetakan kandungan makna dalam istilah kurikulum yang bergerak dari pandangan sempit ke pandangan yang sangat luas. Pergerakan tersebut bersifat kontinum dari kurikulum sebagai pernyataan tujuan dan sasaran (sempit) menuju ke kurikulum sebagai sebuah pengalaman (luas). Di antara kedua kutub tersebut terdapat kurikulum sebagai muatan materi ajar, kurikulum sebagai perencanaan, dan kurikulum sebagai dokumen. Pergerakan konsep kurikulum tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1. yang berikut.



Gambar 2.1. Pergeseran konsepsi kurikulum secara kontinum dari maknanya yang sempit ke maknanya yang luas.

Istilah kurikulum yang difahami oleh banyak orang adalah kurikulum yang berisi seperangkat isi/materi ajar dan tujuan/sasaran kurikulumnya. Bentuk kurikulum yang demikian itu digunakan oleh banyak perguruan tinggi dalam mendeskripsikan kurikulum program studi. Kurikulum model ini relatif lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum sebagai perencanaan; yang di dalamnya terdapat sejumlah rencana pembelajaran siswa melalui deskripsi terhadap metode pengajaran yang akan diterapkan.

Bangunan kurikulum yang lebih lengkap sebenarnya adalah kurikulum sebagai dokumen atau sebagai pengalaman. Bentuk kurikulum sebagai dokumen ini berisi unsur kurikulum secara lengkap; yakni, meliputi unsur tujuan/sasaran, materi ajar, silabi isi pembelajaran, metode yang digunakan, dan kegiatan pengukuran tingkat keberhasilannya.

Sementara itu, dalam kurikulum sebagai pengalaman terdapat kegiatan pembelajaran yang direncanakan dan yang tidak direncanakan, Kegiatan yang direncanakan berisi seperti yang disebutkan dalam kurikulum sebagai dokumen; adapun, yang tidak direncanakan meliputi semua kegiatan pembelajaran lain yang dikerjakan oleh mahasiswa sebagai efek dari kegiatan yang direncanakan; misalnya, gemar membaca, menyenangkan berdiskusi, berselancar (browsing) di internet untuk mencari pemahaman baru, dan seterusnya. Suatu kegiatan pembelajaran mahasiswa yang tidak direncanakan secara formal dan dilakukan oleh mereka secara nyata di lapangan sebagai pengalaman pembelajaran, dalam bahasan kurikulum disebut dengan '*hidden curriculum*' atau kurikulum tersembunyi.

Dari bahasan tentang definisi kurikulum yang disebutkan di atas bahwa pernyataan tujuan/sasaran kurikuler dalam sebuah bangunan kurikulum adalah primer dan tidak boleh tidak diabaikan. Dalam istilah kekinian dalam kurikulum program studi di perguruan tinggi di Indonesia, tujuan dan sasaran kurikuler itu disebut dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) atau 'outcome based learning'. Melalui pernyataan CPL tersebut dibangun isi/materi ajar (*content*), mata kuliah, dan silabinya. Pembahasan tentang hal ini akan dibahas lebih lanjut di bab berikutnya tentang Pengembangan Kurikulum.

## **2.2. Kurikulum inti**

Istilah 'kurikulum inti' tidak asing bagi pengelola perguruan tinggi di Indonesia; mereka sudah terbiasa mendengar dan mengerjakan penyusunannya sejak diterbitkannya Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Siswa. Disebutkan bahwa kurikulum perguruan tinggi terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional (Pasal 7, ayat (1)). Kurikulum inti merupakan "kelompok bahan kajian dan pelajaran harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional." (Pasal 7, ayat (2)). Selanjutnya, dalam

Kepmendiknas No. 045/U/2002 disebutkan bahwa kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama dalam program studi (Pasal 3, ayat (1)).

Adapun, kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan program tinggi, terdiri atas tambahan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan (Kepmendiknas No. 232/U/2000; Pasal 7, ayat (4)). Kurikulum institusional merupakan kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama (Kepmendiknas No. 045/U/2002, Pasal 3, ayat (3)).

Penggunaan istilah kurikulum inti dan kurikulum institusional melekat dalam pemikiran pimpinan perguruan tinggi setidaknya sampai dengan tahun 2019. Sehingga, setiap melakukan pengembangan kurikulum baru mereka menyusun mata kuliah untuk kedua kelompok kurikulum tersebut. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dalam melakukan penilaian terhadap kurikulum program studi di borang lama menggunakan struktur tersebut sebelum diganti dengan borang baru tahun 2019.

Kata kunci untuk konsepsi kurikulum inti, berdasarkan batasan legal di atas, adalah cakupan bahasan yang harus ada dalam sebuah program studi. Dengan ungkapan lain, kurikulum inti adalah tujuan kurikuler dan isi perkuliahan yang merepresentasikan sebuah program studi. Sebuah kurikulum bisa disebut sebagai kurikulum program studi ABC bila di dalamnya terdapat bahasan XYZ. Bila salah satu unsur XYZ tidak ada, maka kurikulum tersebut tidak bisa disebut sebagai kurikulum ABC.

Pemahaman tentang kurikulum inti dan perbedaannya dengan kurikulum institusional relatif jelas; tetapi, menetapkan bahasan dalam kurikulum inti pada sebuah program studi secara operasional tidak sesederhana seperti itu. Diperlukan pemahaman yang prima tentang konsepsi kurikulum inti secara ilmiah dan pemahaman tentang substansi bahasan program studi secara komprehensif. Hanya mereka yang memahami bahasan Agroteknologi yang mampu menyusun kurikulum inti dalam Agroteknologi. Mereka akan mampu menyusun kurikulum inti program studi Agroteknologi dengan benar apabila mereka juga menguasai konsepsi kurikulum inti itu sendiri secara teoretis.

Yang menjadi masalah adalah bahwa definisi kurikulum inti yang disampaikan oleh para pakar kurikulum secara ilmiah berbeda-beda. Definisi umum menyatakan bahwa kurikulum inti adalah 'mata ajar yang menyajikan keterampilan dan pengetahuan utama (*essential*) sebagaimana yang dinilai oleh para pakar; kurikulum inti menyiapkan landasan intelektual dan menata dasar kerja untuk belajar selanjutnya. (Cheever & Sayer, 1982). Definisi yang hampir sama juga dinyatakan

kan oleh Curriculum Development Center Australia “*That set of basic and essential learnings which can reasonably be expected of all students who pass through our schools,*” Pemerintah Kanada juga mendefinisikannya sebagai “*...is the skills and knowledge generally accepted as fundamental or basic to the education of all children and youth throughout the province. The goals and learning outcomes... are those which must be taught* (David H. Tripp & A. John Watt, 1984).

Makna atributif dalam beberapa definisi kurikulum inti yang disebutkan di atas adalah unsur pengetahuan dan keterampilan yang penting dan utama yang difungsikan sebagai landasan pada proses pembelajaran selanjutnya. Banyak para pengamat pendidikan yang mempermasalahkan atribut ‘penting/utama’ yang memberi makna ketidakjelasan; satu kelompok masyarakat menyatakan satu unsur sebagai penting tetapi kelompok lainnya menyatakannya tidak penting. Sebuah penelitian di Amerika menemukan perbedaan pandangan para akademisi dengan para praktisi tentang muatan kurikulum inti di perguruan tinggi (Mary M. Edwards & Lisa K. Bates, 2011). Yang dianggap penting oleh para akademisi didasarkan atas pemikiran pedagogik adalah pembangunan pondasi pengetahuan (*strategic problem solving and communicative action*) dan sekaligus pengembangan keterampilan profesional. Sementara itu, para praktisi menganggap unsur terpentingnya adalah pengetahuan dan keterampilan nyata yang dibutuhkan untuk menunjang pengalaman kerja (*technical skills, design, budgeting, forecasting, and statistical analysis.*)

Dalam kajian ilmiah, pendekatan kurikulum inti banyak digunakan untuk membangun kurikulum pendidikan menengah dan bersifat ‘*subject-centered*’. Dari sisi definisi konsepsi, prosedur penyusunan dan strukturnya, dapat disebutkan bahwa kurikulum inti dikembangkan melalui pendekatan kebijakan (*wisdom approach*). Melalui pengetahuan, kepakaran, dan pandangan bijak dari seseorang atau sekelompok orang unsur isi sebuah kurikulum ditentukan. Bangunan kurikulum inti pada dasarnya lebih bersifat preskriptif ketimbang obyektif dari kebutuhan peserta didik. Karena bersifat preskriptif bentuk kurikulum inti terlalu banyak diwarnai oleh kepentingan pihak yang berkuasa dan kurang mengakomodasi kebutuhan faktual di lapangan.

### **2.3. Kurikulum berbasis kompetensi**

Secara historis, di lingkungan pendidikan Indonesia istilah kurikulum inti sejak diterbitkannya Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tidak digunakan lagi. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga tidak menyebutkan adanya kurikulum inti. Pembahasan kurikulum dikaitkan dengan tujuan pendidikan yakni pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Pasal 35, ayat (2)) yang bangunannya dilakukan melalui melalui organisasi profesi, dunia usaha, dan

dunia industri (Pasal 91, ayat (2a)). Melalui perspektif tersebut, kurikulum tidak lagi dikembangkan berdasarkan pemikiran wisdom yang dilakukan oleh para pakar tetapi didasarkan atas kompetensi lulusan.

Secara teori pada dasarnya istilah kompetensi pertama kali digunakan oleh David McClelland pada tahun 1973 untuk menyatakan sebuah kemampuan yang terkait dengan tugas kerja (*tasks*) di dunia kerja. Dalam dunia pendidikan tinggi, pada awal tahun 1970-an juga dikenal sebagai deklarasi kelahiran dan pertumbuhan konsep *Competency Based Education* (CBE). Awalnya CBE diperkenalkan sebagai landasan filosofis dalam kegiatan pelatihan untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan para guru SD dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Prototipe model pelatihan tersebut selanjutnya diadopsi untuk pengelolaan program pendidikan guru (*teacher education programs*) di sejumlah perguruan tinggi di Amerika Serikat.

Ciri utama dalam program CBE adalah pendidikan yang berfokus atau berorientasi ke kemampuan (*outcome*) atau kompetensi peserta didik. Pengajaran menggunakan sistem modul yang implementasinya dilakukan kegiatan evaluasi dan umpan balik; serta, model pengajarannya bersifat personal (Tuxworth, 1994). Terdapat peralihan fokus kegiatan pembelajaran mahasiswa dalam sistem CBE; yang sebelumnya berorientasikan pada waktu dan proses beralih ke aspek outcome. Pengelolaan pembelajaran mahasiswa bukan pada banyaknya waktu dan jumlah bahan kuliah yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh setiap mahasiswa, tetapi pada apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa setelah kegiatan pembelajarannya selesai dilakukan.

Oleh karena itu, itu dalam kaitannya dengan praktek kegiatan pembelajaran dalam sistem CBE ini, sesuai dengan makna kompetensi, kegiatan pembelajaran dimaknakan sebagai penguasaan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan kemampuan (*abilities*), atau yang disingkat dengan KSA. Karena konsepnya terlalu banyak membicarakan kompetensi, banyak pengamat yang mengkritik bahwa pada dasarnya konsep CBE sangat kabur. Konsep CBE lebih banyak pada aspek evaluasi pendidikan ketimbang konsepsi dan hakikat pendidikan itu sendiri (Jennifer Simonds, Ellen Behrens, & Jessica Holzbaue, 2017).

Terlepas dari pro kontra tentang keefektifan CBE, yang jelas kurikulum berbasis kompetensi (*competency based curriculum*) sebagai perangkat pembelajaran dalam CBE dideskripsikan sebagai rancangan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang menekankan pada capaian pembelajaran kompleks yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam pengembangan kompetensi ini terdapat pemetaan yang jelas bagaimana kompetensi tersebut diraih serta penyebutan model evaluasi yang digunakan.

Kompetensi adalah sebuah kemampuan. Secara teknis sebuah kemampuan pada dasarnya merupakan penerapan atas pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai dalam lingkungan nyata. Oleh karena itu, sering disebutkan oleh para pakar bahwa bentuk kompetensi yang terdapat dalam kurikulum terkait dengan kebutuhan tenaga kerja (work force) yang ditetapkan oleh pengusaha, dunia profesi, atau para praktisi di lapangan. Hal itu seperti yang dinyatakan oleh Jones (2001) bahwa “*A curriculum consists of a specified, organized body of learning activities designed to equip students with the KSAs and integrative experiences that lead to the acquisition of competencies needed for a degree.*”

Dalam perspektif pengembangan kurikulum di perguruan tinggi Indonesia muatan kompetensi yang didasarkan atas kebutuhan profesi sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional (UU No. 12 tahun 2012, Pasal 29, ayat (2)). Berdasarkan ketentuan perundangan tersebut setiap kurikulum program studi harus bermuatan kompetensi kerja di samping kompetensi akademik dalam bidang ilmu sebagai kompetensi lulusan. Hal tersebut pada dasarnya menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah program studi yang profesinya tidak tersedia; misalnya, sastra, sejarah, arkeologi, ilmu dasar MIPA dan lain-lainnya.

Kurikulum berbasis kompetensi ini secara tidak langsung telah menjadi kebijakan pemerintah sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti. Dalam keputusan tersebut kompetensi disebut sebagai hasil didik suatu program studi atau dengan kata lain disebut hasil pembelajaran mahasiswa (Pasal 2). Dalam keputusan tersebut juga ditetapkan keterlibatan masyarakat profesi dan pengguna lulusan dalam membangun kompetensi lulusan (Pasal 6, ayat (2)). Sehubungan dengan hal itu, sejak awal tahun 2000-an dan bahkan sampai saat ini, proposal pengajuan pembukaan program studi baru oleh sebuah perguruan tinggi ke DIKTI diharuskan melampirkan pemetaan (*mapping*) lapangan kerja bagi setiap lulusan.

Berdasarkan konsepsi kurikulum berbasis kompetensi tersebut alur pemikiran penyusunan kurikulum program studi diawali dengan memetakan lapangan kerja bagi lulusan dan menentukan kompetensi yang diperlukan. Hal yang demikian itu, berbeda dengan kurikulum tradisional atau kurikulum inti yang diawali dengan membuat kajian tentang hakikat program studi secara perskriptif dan dilanjutkan dengan menentukan substansi muatan yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Prosedur penyusunan kurikulum berbasis kompetensi diawali dengan menentukan kompetensi lulusan dan berdasarkan deskripsinya dihadirkan sejumlah materi ajar yang harus ditempuh oleh mahasiswa.

Kata kunci dari kurikulum berbasis kompetensi adalah penentuannya berdasarkan analisis kebutuhan yang teridentifikasi. Profesi seorang manajer sangat bervariasi dan sebuah perguruan tinggi bisa mengidentifikasi salah satunya dan menentukan



kompetensinya. Berdasarkan kompetensi yang teridentifikasi tersebut sebuah kurikulum program studi Manajemen Bisnis dibangun. Bentuk bangunan kurikulum tersebut sekalipun untuk nama program studi yang sama bisa jadi berbeda dengan yang dibangun oleh perguruan tinggi lain karena perbedaan identifikasi yang ditemukan.

#### **2.4. Kurikulum berbasis capaian pembelajaran (*learning outcomes*)**

Secara konsepsi kurikulum berbasis outcome pada dasarnya hampir sama dengan kurikulum berbasis kompetensi, seperti yang disebutkan di atas. Kedua model kurikulum tersebut dikembangkan berdasarkan kebutuhan peserta didik dan bukan pada rekayasa pemikiran filosofis yang berasal dari para pakar. Kurikulum berbasis kompetensi dikembangkan dalam perspektif teori pendidikan *competency based education* (CBE), dan kurikulum berbasis outcome menginduk pada teori pendidikan yang berbentuk *outcome based education* (OBE), atau sistem pendidikan yang berbasis luaran.

Pendidikan berbasis luaran atau OBE berkembang di daratan Eropa, yang disebutkan untuk mereformasi sistem pendidikan sebelumnya. Dalam pendidikan konvensional terdapat ciri bangunan kurikulumnya yang hanya di mana kurikulumnya hanya menyajikan daftar mata kuliah dan kegiatan ujian untuk mengukur tingkat serapannya. Pendidikan berbasis luaran ditandai dengan keberadaan kurikulum yang berfokus pada luaran pembelajaran (*learning outcome*).

Terdapat perbedaan makna antara pendidikan ‘berbasis luaran’ (*outcome based*) dan pendidikan yang menghasilkan luaran (*producing outcomes*). Pendidikan berbasis luaran menghasilkan lulusan sesuai dengan desain kurikulum dan pengajaran di mana luaran pembelajaran telah ditetapkan. Misalnya, pendidikan pada program studi manajemen perlu diperjelas sarjana manajemen seperti apa yang direncanakan untuk diciptakan. Manajer dalam bidang apa yang akan disiptakan? Kompetensi apa saja yang dimilikinya? Keterampilan dasar serta atribut pribadi (komunikasi, kepemimpinan, kedisiplinan, dan lain-lainnya) seperti apa yang telah ia kuasai? Apakah ia bisa bekerja di semua jenis perkantoran; bisnis, industri, pemerintah? Sejauh mana ia mampu meneliti secara ilmiah dan mandiri? Sementara tu, pendidikan yang menghasilkan hasil hanya terbatas pada penciptaan lulusan dengan spesifikasi khusus seperti yang dilakukan melalui kursus-kursus atau pelatihan.

Di daratan Eropa gerakan pendidikan berbasis luaran diinisiasi oleh European Qualifications Framework (EQF), yang didirikan pada tahun 2008. EQF mendefinisikan pembelajaran luaran (*learning outcomes*) sebagai “*statements of what a learner knows, understands and is able to do on completion of a learning process.*” (Pernyataan tertentu yang oleh mahasiswa dapat ketahui, fahami, dan kerjakan setelah proses pembelajaran selesai.) Dari definisi tersebut terlihat

bahwa luaran pembelajaran (*learning outcomes*) hampir sama dengan konsepsi kompetensi pembelajaran (*learning competencies*) yang sebelumnya telah diuraikan secara rinci di bagian sebelumnya.

Selanjutnya, dari sisi penguasaan kompetensi dalam sistem pendidikan, EQF mengelompokkan pendidikan berdasarkan peningkatan kefasihan (*proficiency*) capaian pembelajaran yang berjenjang secara kontinum dari Level 1 sampai dengan Level 8. Penyusunan kualifikasi ini dimaksudkan sebagai alat untuk memahami kualifikasi nasional di setiap negara agar lebih mudah difahami dan diperbandingkan antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam ruang lingkup pendidikan tinggi, EQF membagi pendidikan menjadi tiga kelompok yakni bachelor level (180-240 kredit), master level (90-120 kredit), dan doctor level.

Diakui atau tidak, sistem pendidikan di Indonesia pada dasarnya mengadopsi ketentuan sistem pendidikan yang ditetapkan oleh EQF di atas. Pemerintah melalui Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 (17 Januari 2012) memberlakukan kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI). Tujuan pendidikan dideskripsikan sebagai suatu capaian pembelajaran yang meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, kemampuan untuk bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Kualifikasi pendidikan juga ditentukan secara berjenjang secara kontinum yang bergerak dari jenjang 1 (SD) sampai dengan jenjang 9 (Doktor). Ketentuan tentang KKNI ini menjadi kebijakan penting bagi setiap perguruan tinggi di Indonesia untuk dilaksanakan, khususnya setelah isinya juga dimuat kembali dalam Undang-undang No. 12 tahun 2012 (10 Agustus 2012).

Dalam kaitannya dengan kebijakan pendidikan yang disebutkan di atas, kebijakan penyusunan kurikulum perguruan tinggi juga seharusnya menggunakan pendekatan capaian pembelajaran lulusan (CPL), atau kebijakan KKNI, atau menggunakan model *outcome based curriculum*. Oleh karena itu, pedoman pengembangan kurikulum perguruan tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berisikan model penyusunan yang berasaskan kebijakan capaian pembelajaran lulusan (*outcome based*).

Dalam bahasan teori pendidikan, sebenarnya istilah kurikulum berbasis luaran tidak dikenal atau dibahas oleh para akademisi secara khusus dan mendalam. Yang banyak penulis atau peneliti lakukan pembahasan adalah tentang pendidikan berbasis luaran atau *outcome based education* (OBE). Dalam OBE tersebut terdapat sejumlah unsur penting dalam pendidikan yang salah satunya adalah kurikulum. Dalam hal itu, kurikulum yang dikembangkan melalui prinsip OBE disebut sebagai *outcome based curriculum*.

Dalam sistem OBE, kegiatan pengajaran difokuskan agar mahasiswa dapat mengerjakan sesuatu secara nyata setelah selesainya kegiatan tersebut. Semua kebijakan kurikuler dan pengajaran diarahkan untuk memfasilitasi mahasiswa secara

berkualitas agar mereka mampu mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran juga bukan bersifat ‘one-shot’ atau sekali perbuatan saja tetapi bersifat ‘life-long learning outcome’ yang terus berkembang sesuai dengan perjalanan kehidupan para lulusan. Oleh karena itu, prosedur penyusunan kurikulum dalam sistem OBE diawali dengan mengidentifikasi capaian pembelajaran yang dikehendaki; kemudian diikuti dengan penyediaan media penunjang lainnya dalam kurikulum sesuai dengan capaian pembelajarannya (Fitzpatrick, 1995; Furman, 1994).

Tingkat keberhasilan kurikulum berbasis luaran ini terletak pada keberhasilan seseorang dalam mengidentifikasi kegiatan tertentu yang diharapkan dapat dikerjakan oleh para lulusan setelah ia menyelesaikan pendidikannya. Di samping itu, pengembang kurikulum juga dituntut untuk bisa menentukan faktor kunci yang mampu mengantarkan para lulusan mampu melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar dan berhasil. Selanjutnya, secara operasional dalam tatanan pengajaran, setiap dosen juga dituntut untuk mampu mengidentifikasi pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skills*) apa yang terkait dengan pembangunan kemampuan kerja lulusan tersebut melalui mata kuliah yang dikelolanya.

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) atau *learning outcomes* dalam kurikulum pada dasarnya pernyataan kurikuler yang mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh mahasiswa pada akhir setiap perkuliahan yang nantinya bisa ia gunakan dalam berbagai konteks lingkungan. Pada konsep pembelajaran mahasiswa aktif, pernyataan tersebut dikenal dengan tujuan pembelajaran (*learning objectives*) yang sebenarnya kedua istilah tersebut bermakna sama. Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada fokus kegiatan; *learning outcomes* lebih kongkret dan terarah bagi setiap mahasiswa dibandingkan dengan *learning objectives* yang bersifat umum dan bagi mahasiswa dan dosen.

## **2.5. Kurikulum Merdeka Belajar**

Istilah merdeka belajar bukan berasal dari bahasan ilmiah dalam teori pendidikan tetapi sebuah kebijakan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Permen-dikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam ketentuan pemerintah tersebut mahasiswa program Sarjana difasilitasi dengan media dan kegiatan pembelajaran yang sangat bervariasi (Pasal 14, ayat (5)). Di antara media yang disebutkan adalah kuliah, responsi/tutorial, seminar, praktikum, penelitian/perancangan/pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, atau pengabdian kepada masyarakat. Pada pengembangannya kurikulum merdeka belajar juga diperuntukkan pada program diploma.

Kegiatan pembelajaran mahasiswa juga dimungkinkan untuk dilakukan di luar program studinya dengan beban sebanyak 3 (tiga) semester atau setara dengan 60 sks

(Pasal 15). Kebijakan merdeka belajar hanya diaplikasikan sementara ini untuk program sarjana namun sudah juga direncanakan untuk program diploma pada seluruh program studi kecuali program studi kesehatan, yang kurikulumnya telah ditetapkan secara tetap dan terstandar.

Implikasi dari kebijakan merdeka belajar tersebut adalah bahwa setiap program program studi yang dikelola oleh sebuah perguruan tinggi dapat memetakan kebutuhan mahasiswa untuk mempelajari substansi di luar bidang keilmuannya. Substansi lain tersebut bisa diambil di luar kampus sebanyak-banyaknya 40 sks dan dalam kampus maksimal sebanyak 20 sks.

Sebagai suatu program pembelajaran bagi mahasiswa, sebuah kurikulum pada merdeka belajar secara teori tetap berorientasikan pada prinsip capaian pembelajaran lulusan (CPL) atau *learning outcome* yang bermakna. Untuk menciptakan kebermaknaan tersebut, bangunan kurikulum program studi harus terencana dalam susunan yang terintegrasi. Beban pembelajaran di luar program studi tidak seharusnya berbentuk acak-acakan, berserakan, tidak terencana, dan tidak terkait dengan pembangunan CPL yang teridentifikasi.

Mengaplikasi kebijakan merdeka belajar bagi pengelola program studi pada dasarnya tidak sederhana. Diperlukan sumber daya pendukung yang memadai agar kebijakan merdeka belajar tersebut dapat dilaksanakan dengan keberhasilan yang bermakna. Menyusun kurikulum dengan mengakomodasikan prinsip merdeka belajar tanpa mempertimbangkan daya dukung yang ada akan menjadikan kurikulum hanya bersifat ideal; bagus di atas kertas tetapi tidak bisa terimplementasikan secara nyata.

Daya dukung pertama adalah keberadaan kerjasama aktif dengan institusi lain yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, bisnis, industri, atau sosial budaya lainnya. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran yang dikendalikan oleh mitra kerjasama secara kurikuler dibangun bersama antara perguruan tinggi dengan mitranya. Daya dukung lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan anggaran yang memadai dan terjangkau bagi mahasiswa. Kegiatan perkuliahan melalui pertukaran mahasiswa di dalam maupun luar negeri pasti memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penerapan program KKN juga tidak mudah; adanya koordinasi dengan program kegiatan untuk pembangunan daerah, biaya transportasi dan akomodasi mahasiswa, biaya supervisor, dan pembiayaan lainnya. Namun demikian, adanya program-program (*platform*) kegiatan merdeka belajar yang digulirkan oleh Dirjen DIKTI memudahkan pelaksanaan merdeka belajar yang segala informasinya dapat diikuti pada laman <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>.

## **BAB III:**

### **PENGEMBANGAN KURIKULUM**

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kebijakan pengembangan kurikulum di perguruan tinggi di Indonesia diharuskan untuk mengikuti prinsip KKNI. Pandangan filosofis KKNI tentang pendidikan adalah bahwa pengelolaan pendidikan diarahkan untuk meraih capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang terintegrasi dengan dunia kerja. Konteks pendidikan yang demikian itu secara teoretis bagi setiap perguruan tinggi pada dasarnya adalah penerapan prinsip *outcome based education* (OBE) di mana penjelasan konsepsinya secara ringkas telah dibahas sebelumnya.

Secara teori OBE (*outcome based education*) mempunyai paradigma pendidikan tertentu yang dibangun atas asumsi logika yang dibangunnya. Untuk itu, pengembangan kurikulum dalam prinsip OBE berbeda dengan langkah-langkah pengembangan kurikulum yang menggunakan CBE (*competency-based education*), kurikulum inti (*core curriculum*), atau pendekatan pendidikan lainnya.

Dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum berbasis luaran atau berbasis capaian pembelajaran lulusan atau berbasis KKNI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menerbitkan sejumlah buku pedoman penyusunan kurikulum. Pedoman terakhir yang diterbitkannya adalah Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Dikti, Agustus 2020).

Setiap perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Borobudur, dapat mengikuti prosedur penyusunan kurikulum sebagaimana yang dideskripsikan dalam buku pedoman tersebut. Secara singkat dan padat dalam bagian ini diuraikan prinsip-prinsip yang berikut.

#### **3.1. Pengelolaan kurikulum**

Seperti yang telah difahami bahwa sesuai dengan batasan legal yang terdapat dalam peraturan dan perundangan di Indonesia, dalam setiap program studi terdapat dua unsur penting; yakni, kurikulum dan metode pengajaran. Program studi yang menjadi peminatan bidang keilmuan mahasiswa pada dasarnya berisi tentang kurikulum dan metode pengajaran.

Kurikulum berdasarkan konsepsinya secara teori adalah seperangkat dokumen yang berisi tujuan, rancangan kegiatan, pelaksanaan, dan catatan evaluasi kegiatan pembelajaran mahasiswa. Adapun, metode pengajaran adalah strategi, cara, dan teknik dosen yang digunakan untuk mengkomunikasikan materi ajar agar dapat dicerna secara bermakna oleh mahasiswa. Untuk itu,

mengelola program studi pada dasarnya adalah mengelola kurikulum dan mengelola metode pengajaran.

Seperti yang terdapat dalam konsepsi manajemen, pada setiap kegiatan pengelolaan terdapat sejumlah unsur yang bersiklus dan antara satu dengan lainnya terdapat integrasi yang bermakna. Unsur kegiatan tersebut terdiri atas perencanaan (*plan*), penataan (*organization*), pelaksanaan (*execution*), dan kontrol (*control*). Begitu pula, sebuah kurikulum di program studi memerlukan kegiatan pengelolaan yang tersistem dengan unsur manajemen yang disebutkan di atas. Bila menyusun sebuah kurikulum program studi diasumsikan sebagai suatu proyek (program kerja), maka unsur kegiatan yang perlu dikelola juga meliputi aspek yang disebutkan di atas. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2020) menyebutkan tahapan kegiatan pengelolaan pengembangan kurikulum secara rinci menjadi 5 (lima) tahapan yang bersiklus, seperti yang terlihat di Gambar 3.1 yang berikut.



Gambar 3.1. Unsur dan tahapan kegiatan pengelolaan pengembangan kurikulum program studi yang bersiklus (DIKTI, 2020)

Seperti yang terlihat pada Gambar 3.1. dalam mengelola penyusunan sebuah kurikulum program studi diawali dengan kegiatan perencanaan dan diakhiri dengan kontrol (evaluasi). Pada tahapan kegiatan perencanaan kegiatannya diisi dengan tahapan analisis dan perancangan. Setiap tahapan saling berinteraksi dalam pemberian umpan balik dalam rangka penciptaan sebuah bangunan kurikulum program studi yang berkualitas dan *applicable*.

Satu hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa acuan kualitas yang digunakan oleh setiap program studi dalam rangka mengembangkan kurikulum adalah deskripsi mutu yang ditetapkan oleh pemerintah dan dikembangkan oleh sistem penjaminan mutu yang berada di perguruan tinggi.

### **3.2. Prosedur pengembangan kurikulum**

Mengacu pada tahapan pengembangan kurikulum program studi sebagaimana yang diuraikan dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum (DIKTI, 2020), terdapat 5 (lima) tahapan untuk menyusun kurikulum, seperti yang terlihat pada Gambar 3.1 di atas. Tahapn tersebut adalah 1. Analisis, 2. Perancangan, 3. Pengembangan, 4, Pelaksanaan, dan 5. Evaluasi. Sebagai sebuah tahapan, kegiatannya harus dilaksanakan secara berurutan; hasil sebuah tahapan menjadi dasar untuk mengerjakan tahapan berikutnya.

Rincian bentuk kegiatan dan hasilnya diuaraa secara singjat dalam bagian ini.

#### ***Tabapan 1: Analisis***

Fase perencanaan dalam penyusunan kurikulum program studi pada dasarnya adalah kegiatan yang paling kritis, yang teerasuk di dalamnya adalah melakukan kegiatan analisis. Seperti biasanya, kegiatan analisis memerlukan data dan informasi yang cukup dan lengkap agar mampu menghasilkan sebuah keputusan yang valid. Kegiatan analisis ini dilakukan untuk menemukan sebuah kebutuhan yang perlu ditindak lanjuti perguruan tinggi. Dalam penyusunan kurikulum, bentuk kebutuhan tersebut dirumuskan dalam **profil lulusan**.

Data dan informasi yang menjadi obyek analisis meliputi dokumen internal institusi yang berisi tentang visi, misi, dan tujuan. Di samping itu, data tentang sumber daya yang dimiliki juga sangat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang nantinya bisa dilaksanakan. Data eksternal yang perlu dikumpulkan adalah kebutuhan stakeholders dan juga masukan stakeholders yang telah terkumpulkan melalui kegiatan studi pelacakan (*tracer study*).

Data eksternal lainnya yang perlu dijadikan masukan dalam analisis adalah informasi pesaing da kebijakan pemerintah. Pemahaman tentang kapasitas dan kualitas pesaing akan memberikan arah strategis bagi institusi untuk menentukan segmentasi pasarnya. Mengkopi profil lulusan yang telah dikembangkan oleh perguruan tinggi besar oleh perguruan tinggi kecil akan menjadi bumerang karena tidak akan kuat untuk bersaing.

#### ***Tabapan 2: Perancangan***

Langkah berikutnya setekah analisis profil lulusan adalah perancangan atau yang disitilahkan secara populer dengan membuat desain kurikulum. diberdasarkan kajian lapangan dan daya dukung institusi dilakukan dalam rangka

menemukan profil lulusan. Melalui deskripsi profil lulusan yang dikehendaki oleh institusi sebuah kurikulum baru bisa dimulai untuk dilakukan pengerjaannya secara teknis.

Kegiatan kedua dalam tahapan perencanaan adalah menyusun capaian pembelajaran lulusan (CPL). Sebuah profil lulusan yang telah ditetapkan dianalisis lebih lanjut untuk ditemukan atribut pokoknya secara profesional. Atribut profesi, pekerjaan, atau perilaku kerja tersebut pada dasarnya adalah capaian pembelajaran atau *learning outcome*.

Berdasarkan pernyataan capaian pembelajaran yang teridentifikasi, sejumlah bahan kajian atau bidang pengetahuan dan keterampilan dianalisis secara logis dan ilmiah untuk dimuatkan dalam kurikulum. Bahan kajian tersebut seharusnya diberi bobot sks berdasarkan besarnya sumbangan masing-masing terhadap pembentukan profil lulusan. Bahan kajian yang menjadi pusat pembelajaran mahasiswa ini pada dasarnya bukan mengajarkan sebuah ‘outcome’ tetapi menyajikan bahan ajar yang berfungsi sebagai unsur pendorong terciptanya outcome atau capaian pembelajaran lulusan tersebut.

Berdasarkan uraian kegiatan dalam tahapan perencanaan yang disebutkan di atas, sangat jelas bahwa tahapan ini bernilai sangat kritis. Kekeliruan dalam menentukan profil lulusan dan pernyataan capaian pembelajaran lulusan, dan menyebutkan substansi kajian yang tepat akan mengakibatkan bangunan kurikulum menjadi liar, tidak terfokus, hambar, atau tidak ada rasa spesialnya.

### ***Tahapan 3: Pengembangan***

Pada tahapan organisasi atau tahapan ketiga (pengembangan), isi kurikulum disusun secara rinci. Pada tahapan ini tim penyusun kurikulum melakukan tugas kerjanya secara massive. Dalam proyek pengembangan kurikulum baru atau kurikulum ‘peninjauan kembali’ tugas kerja tim paling banyak dilakukan pada tahapan ini.

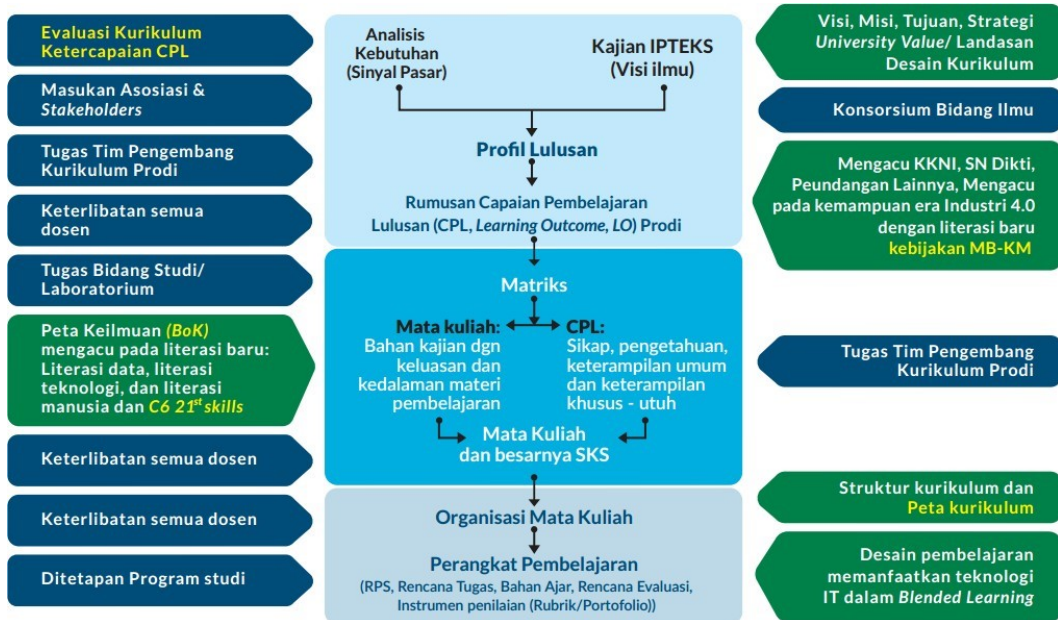
Terdapat sejumlah rincian kerja yang harus dilakukan pada tahapan ini; dan yang paling penting adalah yang berikut:

- a. Setiap bahan kajian ditentukan kelompok mata kuliah dan bobot sks secara agregat; misalnya, pada bahan kajian “Linguistik” terdapat sejumlah pokok bahasan perkuliahan yang terdiri atas pure linguistics, applied linguistics, historical linguistics, dan seterusnya.
- b. Setiap pokok bahasan perkuliahan terdapat bobot sks agregat dan harus dipecah menjadi sejumlah mata kuliah. Pemecahan bahasan perkuliahan didasarkan atas anatomi materi ajar menjadi mata kuliah, dan setiap mata kuliah diberi bobot sesuai dengan besaran materi ajar yang terdapat di dalamnya.



- c. Pemberian nama mata kuliah yang bersifat unik sesuai dengan isi bahasan materi ajar yang terdapat di dalamnya dan memberikan kode mata kuliah berdasarkan sistem yang ditetapkan. Perlu dicatat bahwa pada pendekatan kurikulum berbasis outcome setiap matakuliah harus memberi sebuah keutuhan CPL; sehingga, nama mata kuliah agar tidak menggunakan nama yang berbentuk serial; misalnya, Linguistik 1, Linguistik 2, dan seterusnya.
- d. Untuk setiap mata kuliah yang telah dibangun dalam kurikulum, deskripsinya perlu dituliskan secara singkat. Deskripsi singkat tersebut pada umumnya disebut dengan silabi mata kuliah.
- e. Langkah terakhir dalam tahapan ini adalah mengatur sajian mata kuliah dalam sistem semester. Dalam bangunan kurikulum berbasis outcome, pada setiap semester ungkapan CPL juga harus jelas. Hal ini berarti bahwa sejumlah mata kuliah yang disajikan pada setiap semester harus membangun sebuah kompetensi yang utuh.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2020) dalam buku ‘Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi’ menekankan bahwa pengembangan kurikulum melibatkan banyak kegiatan strategis dan sejumlah pihak, yang termasuk di dalamnya adalah asosiasi dan stakeholders. Pekerjaan mengembangkan kurikulum program studi bukan kegiatan sederhana tetapi sangat kompleks dan memerlukan pemikiran yang mendalam. Sekalipun demikian, prosedur kerjanya telah tertata rapi sehingga bisa diikuti dari satu tahap ke tahap yang lainnya, seperti yang terlihat pada Gambar 3.2 yang berikut.



Gambar 3.2. Skema pengembangan kurikulum dan beberapa unsur dan pihak yang terlibat di dalamnya (DIKTI, 2020)

#### *Tabapan 4: Pelaksanaan*

Pada tahapan ini bangunan kurikulum telah selesai dan lengkap; namun, untuk memastikan bahwa desain kurikulum sudah tepat dan benar sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, pada tahapan ini pengembang kurikulum perlu melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui uji publik, komentar pakar, lokakarya, atau bimbingan teknis (bimtek).

Kegiatan sosialisasi kurikulum ini yang dilakukan dengan berbagai media atau salah satunya dimaksudkan untuk mengumpulkan kemungkinan terjadinya kekeliruan konsep, prosedur, atau penetapan bahan ajar yang kurang sesuai dengan yang seharusnya. Melalui kajian dokumenter seorang pakar atau peserta sosialisasi bisa memberikan masukan perbaikan isi, struktur, atau bahan kajian yang terdapat dalam kurikulum program studi.

Sementara itu, dalam rangka memberikan pengetahuan dan wawasan teknis dilakukan pula bimbingan teknis (bimtek) kepada dosen dan tenaga kependidikan tentang isi kurikulum baru. Kegiatan ini dimaksudkan agar mereka memahami filosofi, strategi, dan operasional kurikulum sebagaimana yang telah digunakan oleh para penyusun kurikulum. Salah satu materi bimtek yang paling penting di antaranya adalah mendeskripsikan bagaimana bangunan kurikulum prodi benar-benar mampu mengantarkan peserta didik meraih kesuksesan menuju profil lulusan yang ditetapkan.

Kurikulum yang sudah disosialisasikan kepada stakeholder dan telah dikualifikasi dan sesuai dengan standar perguruan tinggi, selanjutnya dilaksanakan untuk pembelajaran mahasiswa. Pelaksanaan kurikulum diawali dengan pemeriksaan ketersediaan infra struktur (sarana dan prasarana) yang diperlukan serta kesiapan perangkatnya; misalnya, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), media pembelajaran, dan perangkat evaluasi keberadaan CPL

#### *Tabapan 5: Evaluasi*

Kurikulum yang telah selesai disusun berdasarkan asumsi ilmiah dari sisi sasaran pembelajaran yang berbentuk profil lulusan, kondisi peserta didik, dan dukungan lingkungan pada dasarnya mempunyai kebenaran yang sifatnya hipotetis. Rancangan kegiatan pembelajaran mahasiswa untuk membangun seorang profil lulusan menjadi benar bila dalam kurun alokasi waktu yang telah ditentukan benar profil lulusan mampu diciptakan.

Sehubungan dengan hal itu, kurikulum program studi yang telah disusun tersebut harus dilaksanakan secara berdisiplin sesuai dengan asumsi dan prinsipnya. Pelaksanaan ketentuan pembelajaran dalam kurikulum program studi di monitor secara berdisiplin dari waktu ke waktu dan selanjutnya

### 3.3. Kurikulum Merdeka Belajar

Merdeka belajar adalah seperangkat kegiatan pembelajaran mahasiswa yang diperokeh dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar program studi yang dipelajarinya. Kegiatan pembelajaran di luar program studi ini diatur dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 18; yakni, sebanyak-banyaknya 20 sks dari program studi di dalam institusi dan 40 sks di luar institusi. Variasi kegiatan pembelajaran yang dapat diikuti oleh mahasiswa meliputi pertukaran pelajar, magang, mengajar di sekolah, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, wirausaha, proyek independen, dan membangun desa (Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020).

Sebagai bagian dari kurikulum program studi, bahan kajian dalam kelompok merdeka belajar, yang disebutkan di atas harus terstruktur seperti bahan kajian lain dalam kurikulum program studi. Bahan kajian tersebut harus diterjemahkan menjadi mata kuliah yang mempunyai beban sks, silabi mata kuliah, yang termasuk di dalamnya adalah pokok bahasan materi ajar yang bisa dipelajari oleh mahasiswa.

Status mata kuliah dalam kelompok merdeka belajar bersifat pilihan yang berarti bahwa setiap mahasiswa boleh memprogramkan atau tidak memprogramkan dalam pembelajarannya, atau diarahkan oleh kebijakan institusi. Setiap mata kuliah merdeka belajar juga bersifat mandiri, berdiri sendiri, atau tidak terkait dengan mata kuliah lain dalam sebuah paket perkuliahan. Sehubungan dengan status mata kuliah merdeka belajar ini, setiap mahasiswa boleh mengambil sebanyak 1, 2, atau 3 mata kuliah; dan bisa juga seorang mahasiswa mengambil semua mata kuliah merdeka belajar sebagaimana yang dibangun dalam kurikulum program studi.

Kegiatan belajar dalam kelompok merdeka belajar, seperti, magang, kewirausahaan, mengajar di sekolah, pengembangan ilmu, bangun desa, dan lain-lainnya diakui sebagai bagian pembelajaran mahasiswa di program studi, apabila kegiatan merdeka belajar tersebut dapat dikonversi sebagai mata kuliah atau sebagai kegiatan pembelajaran yang berbobot tertentu sesuai dengan pembobotan oleh mitra bersama dosen pembimbing (misal magang bersertifikat atau studi independen yang dapat diakui berbobot sebesar 12 sks), yang disusun saat perencanaan dan disepakati oleh UPPS. Namun demikian dapat juga diakui sebagai kompetensi *hard skill* dan atau *soft skill* yang dicantumkan dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah). Dengan demikian, semua kegiatan pembelajaran mahasiswa di program studi harus terencana dalam perencanaan pembelajaran mahasiswa dan pelaksanaannya secara nyata adalah kurikulum program studi. Dengan demikian, bangunan atau desain kurikulum program studi di samping harus terfokus pada kegiatan pembangunan profil lulusan, sebagaimana yang ditentukan oleh program studi, kurikulum juga harus fleksibel atau lentur yang ditujukan untuk bisa mengakomodasikan kebutuhan peserta belajar yang sangat bervariasi.

### 3.4. Tim penyusun kurikulum

Mengelola kurikulum sebenarnya sama halnya dengan mengelola program studi karena unsur utama dalam program studi adalah kurikulum di samping metode pengajaran. Untuk itu, menyusun kurikulum program studi harus dikerjakan dengan serius, hati-hati, dan dilakukan oleh mereka yang telah memahami hakikat kurikulum dalam kegiatan pendidikan tinggi.

Bangunan kurikulum program studi di sebuah perguruan tinggi bersifat unik atau khas bagi perguruan tinggi tersebut. Hal itu disebabkan karena kurikulum dibangun dari olah pikir filosofis, historis, sosiologis, psikologis, dan teknologis dalam konteks perguruan tinggi tersebut. Sebuah kurikulum program studi di perguruan tinggi tidak benar bila dibangun melalui kegiatan ‘mengintip’ kurikulum program studi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan dicampur dengan bahan dari perguruan tinggi lain. Kurikulum yang demikian itu disebut ‘kurikulum mozaik’.

Agar menghasilkan kurikulum yang baik, benar, terarah, dan bersifat unik, dalam menyusun kurikulum baru atau pada kegiatan peninjauan kurikulum perguruan tinggi mengangkat satu tim kerja. Tim kerja dalam menjalankan tugas penyusunan kurikulum mengikuti prosedur kerja yang disusun dalam pedoman ini. Masukan yang sebesar-besarnya dari pemangku kepentingan (stakeholders) sangat penting untuk menghasilkan kurikulum yang hidup, dinamis, dan *applicable* di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, tim penyusun kurikulum seharusnya mewakili unsur stakeholder tersebut; tim kerja penyusun kurikulum beranggotakan unsur yayasan, perguruan tinggi (pimpinan, dosen, mahasiswa, alumni), masyarakat ilmiah (pakar, pemerhati kurikulum), masyarakat profesional (asosiasi profesi, pengguna jasa).



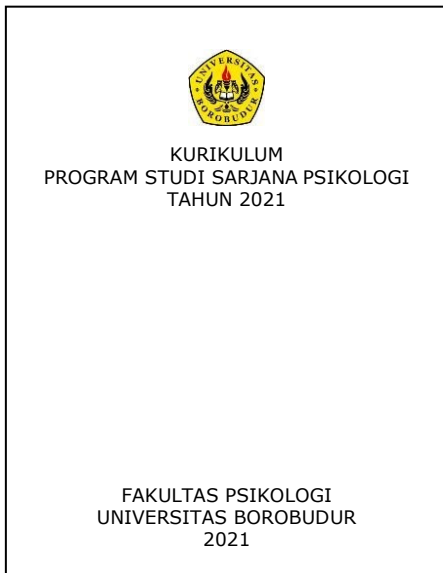
## BAB IV

### DOKUMENTASI DAN STRUKTUR DESAIN KURIKULUM

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa kurikulum secara konsepsi bukan hanya sekedar daftar mata kuliah. Dalam kurikulum program studi terdapat informasi yang menyeluruh tentang pembelajaran mahasiswa yang meliputi sasaran, beban, tahapan pembelajaran, dan evaluasinya. Semua informasi tersebut terekam dalam sebuah dokumen yang utuh. Dalam kaitannya dengan hal itu, dalam bagian ini akan dibahas tentang bentuk dokumentasi kurikulum secara lengkap, pemberlakuannya, dan pengelolaannya.

#### 4.1. Dokumentasi kurikulum

Kurikulum sebagai rancangan pembelajaran mahasiswa harus dikemas dalam sebuah dokumen yang utuh dan menggambarkan pembelajaran mahasiswa untuk mencapai hasil kerja yang telah ditetapkan. Seperti yang telah disebutkan di bagian sebelumnya, dokumen kurikulum bukan hanya menampilkan daftar mata kuliah, distribusinya pada setiap semester, dan uraian silabinya secara singkat.



#### *a. Judul kurikulum*

Dokumen kurikulum harus diberi judul atau nama yang menyatakan nama program studi dan tahun pemberlakuannya. Identitas tahun dalam nama kurikulum bukan pada tahun penyusunannya tetapi tahun pemberlakuannya. Misalnya, Kurikulum Program Sarjana Hukum yang diberlakukannya pada tahun 2021 diberi nama “Kurikulum program Sarjana Hukum Tahun 2021”. Begitu pula untuk penamaan program studi lainnya dan seterusnya.

## *b. Identitas Program Studi*

Identitas program studi dituliskan dalam lembar terpisah yang mendeskripsikan informasi program studi secara lengkap dengan unsur informasi, seperti yang tertulis dalam contoh yang berikut:

IDENTITAS KURIKULUM PROGRAM STUDI	
Perguruan Tinggi	:
Fakultas	:
Program studi	:
Akreditasi	:
Jenjang Pendidikan	: Sarjana
Gelar Lulusan	:
Tingkatan KKNI	: 6
Visi	:
Misi	:
Pengesahan	: SK Rektor No . Tanggal .....

## *c. Landasan penyusunan kurikulum*

Bagian ini berisi tentang uraian singkat tentang latar belakang penyusunan kurikulum dengan menyebutkan sejumlah alasan yang melandasinya. Adaoun, landasan penyusunan kurikulum yang dijelaskan terkait dengan **landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis**, dan lain- lain.

Landasan filosofis berisi tentang pemikiran rasional mengapa memelajari program studi ini sangat penting bagi seseorang. Landasan sosiologis menyebutkan bidang keilmuan dalam programstudi ini berperan dalam kehidupan lingkungan sosial. Landasan psikologis menuliskan ungkapan kebutuhan manusia yang berbeda dan juga perbedaan antara cara seseorang dalam mengelola pembelajaran. Sementara itu, landasan hukum menyebutkan peraturan dan perundangan yang digunakan untuk menyusun kurikulum ini.

Informasi lain yang perlu disebutkan dalam bagian ini adalah **pernyataan visi, misi, tujuan, strategi, dan nilai-nilai yang terdapat dalam Universitas dan im- plementasinya secara operasional di program studi.**

Bila kurikulum yang disusun bersifat peninjauan kembali, maka informasinya perlu dilengkapi dengan hasil studi pelacakan lulusan, khususnya untuk memotret kebutuhan pemangku kepentingan akan sumber daya manusia dengan kualifikasi dan atribut tertentu.

Berdasarkan analisis kebutuhan yang disebutkan dalam latar belakang ini akan dapat ditetapkan **profil lulusan** yang menjadi sasaran utama dari outcome program studi. Profil lulusan dan atributnya di lapangan difungsikan sebagai muara berfikir dan berkayasa dalam penyusunan kurikulum program studi secara menyeluruh.

#### *d. Standar Kompetensi lulusan (SKL)*

SKL adalah pernyataan atributif yang harus dikuasai oleh setiap mahasiswa agar yang bersangkutan bisa dinyatakan lulus program pendidikan. SKL merupakan perilaku ilmiah yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap pribadi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa yang nantinya bisa mendorong yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan profesional, seperti yang digambarkan dalam profil lulusan (*learning outcome*).

Dalam perspektif mahasiswa sebagai pembelajar, pernyataan SK ini disebut sebagai **capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang terdiri dari pernyataan sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan**. Kompetensi umum yang dijadikan dasar untuk pengembangan CPL dapat mengacu pada Lampiran Keputusan Mendikbud No. 3 tahun 2020 dan pernyataan KKNI dalam Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012. Sementara itu, CPL yang bersifat khusus dikembangkan masing-masing program studi berdasarkan profil lulusan yang telah ditetapkan atau yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Contoh pernyataan CPL khusus untuk program studi Sarjana Manajemen diantaranya adalah yang berikut:

Pada akhir pembelajaran dalam program studi Sarjana Manajemen, mahasiswa menguasai pengetahuan yang tersebut di bawah ini.

1. Memahami konsep pemikiran manajemen, pertumbuhannya dari waktu ke waktu, dan penerapannya dalam dunia bisnis.
2. Mempunyai keterampilan manajerial dan keterampilan teknis untuk analisis kontekstual dan pengambilan keputusan bisnis yang valid.
3. Memiliki kemampuan dan sikap positif untuk menetapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam profesinya sebagai manajer bisnis.

Sebagai catatan bahwa setiap unsur kompetensi yang disebutkan di atas tidak harus dinyatakan masing-masing satu pernyataan. Bisa saja unsur pengetahuan atau keterampilan dinyatakan dengan masing-masing dua pernyataan kalau ditemukan di program studi terdapat kelompok pengetahuan atau keterampilan yang signifikan dan harus dibedakan.

#### *e. Bahan kajian dan sub bahan kajian*

CPL yang telah dirumuskan dalam ungkapan secara jelas dan tegas menjadi titik tolak bagi pengembang kurikulum untuk menyusun bahan kajian ilmiah yang mampu mengantarkan mahasiswa mampu menguasai CPL tersebut.

Pengetahuan apa yang harus difahami, keterampilan apa yang harus dimiliki, dan kemampuan atau sikap tertentu seperti apa yang tertanam pada dirinya dalam rangka mendorongnya untuk berperilaku atau bertindak seperti yang diharapkan dalam pernyataan CP atau *learning outcome*.

Hasil pemikiran kurikuler yang disebutkan di atas dalam struktur kurikulum dituliskan dapat menggunakan Tabel 4.1 yang berikut.

**Tabel 4.1. Daftar kelompok bahan kajian, bobot sks, dan status pembelajaran pada kurikulum MBKM program S1\*)**

No-mor	Bahan Kajian	sks	Keterangan
1.	Mata Kuliah Wajib KPT (Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Agama)	8	Wajib
2.	Visi universitas (Kewirausahaan dan Bahasa Inggris)	4	Wajib
3.	Dasar keilmuan	16**	Wajib
4.	Bahan kajian utama	82**	Wajib
5.	Bahan kajian pendukung	10**	Wajib/ Pilihan
5.	Kompetensi lain	12**	Wajib/ Pilihan
6.	Merdeka Belajar		
	a. Antar prodi dalam institusi (smt 2 dan 3)	12-14	Pilihan Wajib
	b. Antar prodi dalam institusi (smt 4)	0-8	Pilihan
	c. Antar prodi di luar institusi	0-20	Pilihan
	d. Kegiatan belajar pilihan salah satu dari 8 kelompok kegiatan di luar institusi	0-40	Pilihan
	Jumlah	144**	Minimal

\*) Program lain menyesuaikan

\*\*). Dapat bervariasi pada masing-masing prodi

Besaran beban bahan kajian pada setiap program studi bisa saja tidak sama, khususnya pada kelompok dasar keilmuan, bahan kajian utama, dan bahan kajian pendukung. Untuk itu, setiap pengembang kurikulum program studi dituntut harus mampu membuat kajian yang komprehensif khususnya sejauh mana bahan kajian utama mampu menciptakan profil lulusan yang ditetapkan.

Selanjutnya, bahan kajian tersebut diuraikan lebih rinci dalam bentuk sub bahan kajian yang merupakan unsur yang terdapat dalam bahan



kajian. Masing- masing sub bahan kajian ditimbang bobotnya berdasarkan kontribusinya terhadap pengembangan CPL Semakin besar sumbangannya terhadap pembangunan CPL atau pembangunan profil lulusan, semakin besar pula bobot sks yang diberikan. Untuk memetakan sub bahan kajian berdasarkan struktur kurikulum dapat digunakan Tabel 4.2. yang berikut.

Sebagai catatan, khusus untuk pengembangan kurikulum program studi Sarjana, pengembangan kurikulum diharuskan untuk menghadirkan mata kuliah yang bersifat pilihan. Penyajian mata kuliah pilihan dalam kurikulum menghadirkan bangunan kurikulum menjadi fleksibel. Mata kuliah pilihan tersebut bisa berbentuk mata kuliah pendukung atau membentuk kompetensi tambahan (konsentrasi) yang terdiri atas beberapa mata kuliah. Jumlah sks untuk mata kuliah pilihan pada kurikulum dapat ditentukan sekurang-kurangnya sebanyak 12 sks. Agar fleksibilitas kurikulum terlihat nyata, disarankan setiap program studi mengembangkan dua konsentrasi dan satu paket pilihan merdeka belajar.

Tabel 4.2. Kurikulum program studi berdasarkan profil, CPL dan bahan kajian

Profil	Capaian Pembelajaran	Wajib KPT				Wajib Univ		Dasar Keilmuan		Bahan Kajian Utama	...	Jumlah BK
		B K 1	B K 2	B K 3	B K 4	B K 5	B K 6	B K 7	...	...		
1.	<b>SIKAP dan TATA NILAI</b> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius	√										
2.		√										
3.												
....												
	<b>KETERAMPILAN UMUM</b> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis,kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora					√						



tinggi.

Kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar institusi dapat diambil dari perguruan tinggi lain di dalam atau di luar negeri sebagai mitra atau bentuk pembelajaran lain yang diakui oleh DIKTI seperti Spada dan MOOCs. Untuk mengadministrasikan kegiatan ini relatif sederhana; yakni, dengan melakukan transfer mata kuliah yang diambilnya dengan mata kuliah yang berada di program studi. Namun pelaksanaannya harus terencana dengan baik.

Kegiatan lain dalam merdeka belajar yang berasal dari luar institusi adalah kegiatan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa melalui kegiatan magang, wirausaha, penelitian/pengembangan, atau kegiatan pengabdian masyarakat dan lainnya. Jenis kegiatan tersebut dalam struktur kurikulum yang disebutkan di atas pada dasarnya adalah bahan kajian atau sub bahan kajian.

Untuk itu agar lebih operasional, sub bahan ajian tersebut perlu diidentifikasi-kan unsur-unsurnya dan setiap unsur tersebut selanjutnya difungsikan sebagai mata kuliah. Setiap kegiatan tersebut memerlukan deskripsi kegiatan pembelajarannya yang dapat disusun bersama mitra institusi dan memberikan bobotnya. Melalui deskripsi pembelajaran mahasiswa di luar kampus tersebut, keberadaan kegiatan mahasiswa di luar kampus dapat diadministrasikan dalam kurikulum program studi. **Konversi** kegiatan belajar di luar institusi dikonversikan kepada mata kuliah, pembobotan secara langsung dan/atau konversi kepada kompetensi *hard skill* dan/atau *soft skill* yang nilainya dapat dicantumkan pada SKPI bukan pada transkrip nilai. Jika mahasiswa mengambil kegiatan tersebut dan dikoversikan pada mata kuliah atau kompetensi lain dengan bobot kurang dari yang ditawarkan pada semester tersebut maka kekurangannya harus ditempuh perkuliahan sisanya pada prodi tersebut.

Tabel 4.3 Kegiatan Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar program Sarjana Universitas Borobudur

Jenis Kegiatan MBKM	Sib bahan kajian>Nama Mata kuliah	Prodi Home Base	Kode (sks)
(1)	(2)	(3)	(4)

Antar Prodi dalam institusi	Pilihan Wajib (12-14 sks) (smt 2 dan 3) 1. Filsafat Ilmu 2. Pengantar Statistik 3. Pengantar Manajemen 4. Kepemimpinan dalam Kewirausahaan 5. Kreatifitas dan Inovasi 6. Kebudayaan Indonesia 7. Perancangan Bisnis  Pilihan (0-8 sks) (smt 1-6) 1. Manajemen SDM 1 2. Sistem Informasi Akuntansi 1 3. Sistem Pertanian Terpadu 4. Manajemen Mutu Agribisnis 5. Hukum Bisnis 6. Fisika Dasar 1 7. Matematika 1A 8. Matematika 1B 9. Statistika 1 10. Matematika 2A 11. Gambar Teknik 12. Arsitektur Hijau 13. Sistem Lingkungan Industri 14. Sistem Informasi Manajemen 15. Robotika 16. Komputer dan Masyarakat 17. Psikologi Forensik 18. Epidemiologi dan Demografi Kesehatan	1. Ilmu Hukum 2. Agroteknologi 3. Manajemen 4. Psikologi  5. Sistem Informasi 6. Arsitektur 7. Teknik Industri  1. Manajemen 2. Akuntansi 3. Agroteknologi 4. Agribisnis 5. Hukum 6. Sipil  7. Sipil 8. Sipil 9. Sipil 10. Sipil 11. Arsitektur 12. Arsitektur 13. Teknik Industri 14. Sistem Informasi 15. Sistem Komputer 16. Informatika 17. Psikologi 18. Keperawatan	1. FH2032 2. PT2022 3. EM2062 4. PS3032  5. SI3102 6. AR3052 7. IT3092  1. EM4022 2. EA4042 3. PF2083 4. PI2562 5. HK2242 6. SD0312 7. SD1712 8. SD1812 9. SD1912 10. SD1722 11. AR2512 12. AR1362 13. IK4442 14. SI4252 15. SK4102 16. IF4252 17. PS10742 18. KK6202
Antar Prodi di luar Institusi	Pilihan (0-20 sks) (smt 3-7)	Ditetapkan oleh mahasiswa dibimbing dosen	
Kegiatan Belajar di Luar institusi	Pilihan satu jenis (0-40 sks) (smt 5-7) 1. Magang kerja 2. Pertukaran mahasiswa 3. Penelitian/Pengembangan 4. Membangun Desa/KKN tematik 5. Kewirausahaan 6. Proyek Kemanusiaan 7. Studi Independen 8. Asistensi/Mengajar di sekolah 9. Indonesian International Student Mobility (IISMA)	Ditetapkan oleh mahasiswa dibimbing dosen	Konversi ke mata kuliah atau pembobotan secara langsung ditampilkan di transkrip atau ketrampilan <i>hard skill</i> atau <i>soft skill</i> ditampilkan di SKPI

Ket:

1. **Magang Kerja** : Program magang ini bisa diikuti selama 1-3 semester. Sama seperti

program sebelumnya, program magang bersertifikat memiliki bobot setara 20 sks. Di program ini mahasiswa bisa belajar langsung di tempat kerja mitra sehingga dapat memperluas jaringan dan hubungan dengan industri terkait.

2. **Pertukaran Mahasiswa:** Program ini ditujukan untuk memberikan mahasiswa kesempatan belajar mengenai keragaman nusantara dan memperluas jaringan akademik antar mahasiswa. Program ini bisa dikatakan sebagai sarana belajar lintas kampus. Bagi mahasiswa yang mengikuti program ini akan menerima konversi 20 sks.
3. **Penelitian/Pengembangan:** Program ini cocok untuk mahasiswa yang memiliki minat menjadi seorang peneliti. Dalam program ini mahasiswa bisa belajar di laboratorium pusat riset. Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penelitian mahasiswa serta ekosistem dan kualitas riset di Indonesia
4. **Membangun Desa/KKN Tematik:** Program ini akan memberikan pengalaman untuk hidup di tengah masyarakat diluar kampus. Bersama dengan masyarakat setempat, mahasiswa diharapkan mengidentifikasi potensi dan memberikan solusi sehingga kedatangan mahasiswa akan bisa mengembangkan potensi desa atau daerah tersebut. KKN juga diharapkan dapat mengasah ilmu, softskill dan leadership mahasiswa bersangkutan.
5. **Kewirausahaan:** Selama program ini berlangsung, mahasiswa akan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi kewirausahaan, menyusun proposal wirausaha, menjalankan kegiatan wirausaha dibawah bimbingan dosen atau mentor kewirausahaan. Program ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan mendukung percepatan ekonomi digital.
6. **Proyek Kemanusiaan:** Program ini melibatkan mahasiswa untuk membantu mengatasi bencana. Dengan adanya proyek kemanusiaan mahasiswa diharapkan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selain itu mahasiswa diharapkan juga dapat meningkatkan kepekaan sosial dan memberikan solusi sesuai dengan keahliannya.
7. **Studi Independen:** Program ini cocok bagi mahasiswa yang memiliki ide inovatif dan memiliki minat untuk melakukan riset. Durasi program studi independen berkisar 1-2 semester. Program studi independen ini memiliki bobot 20 sks. Menariknya pilihan studi tidak harus sesuai dengan bidang atau jurusan kuliah. Jadi mahasiswa bisa melakukan lintas disiplin keilmuan selama memenuhi syarat yang ada.
8. **Asistensi/Mengajar di Sekolah:** Program ini memberi kesempatan untuk melatih skill mengajar sekaligus mengembangkan diri. Dalam program ini mahasiswa akan menjadi mitra guru dalam pembelajaran literasi, numerasi dan adaptasi teknologi untuk jenjang SD dan SMP. Program Kampus Mengajar berlangsung selama 1 semester dan akan mendapat pengakuan hingga 20 sks.
9. **Indonesia International Student Mobility (IISMA):** program mobilitas internasional yang memfasilitasi mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi luar negeri. Mahasiswa yang lolos seleksi berkesempatan untuk kuliah selama 1 semester di perguruan tinggi terpilih. Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperkaya wawasan maupun kompetensi mahasiswa baik yang berhubungan dengan minat maupun pemahaman lintas budaya. Program ini juga memiliki bobot 20 sks.

### *g. Daftar nama mata kuliah, kode, dan silabi*

Sub bahan kajian sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.2 selanjutnya di- analisis untuk ditentukan pokok bahasannya secara menyeluruh dari A-Z. Pokok bahasan tersebut biasa dikenal dengan GBPP (Garis Besar Pokok Perkuliahan). Pokok bahasan yang terurai tersebut selanjutnya dipotong- potong menjadi mata kuliah yang siap diajarkan untuk kegiatan semester. Cara pemotongan bahan ajar atau pokok bahasan tersebut harus mengikuti anatomi struktur bahan ajar tersebut. Seharusnya, pemotongan tidak dilakukan secara otomatis dengan beban sks yang sama rata; misalnya, 2, 3 atau 4 sks. Beban sks setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan banyak dan sedikitnya pokok bahasan yang tercakup dalam mata kuliah tersebut.

Misalnya, dalam bahan kajian ‘Language skills’ terdapat sub bahan kajian ‘Composition’ dengan bobot 8 sks dalam kurikulum program studi bahasa Inggris. Berdasarkan materi bahasannya, sub bahan kajian tersebut dipecah untuk disajikan dalam tiga perkuliahan; yakni, 1. Sentence building (2 sks), 2. Paragraph writing (2 sks), dan Essay writing (4 sks). Perlu diketahui bahwa dalam prinsip pengembangan kurikulum berbasis outcome, setiap mata kuliah bersifat independent dengan pernyataan CPL yang terkait dengan standar kompetensi lulusan (SKL) yang ditetapkan. Untuk itu, kebijakan pemberian nama untuk setiap mata kuliah dipersyaratkan bersifat unik atau tersegmentasi secara khusus dan utuh. Penamaan mata kuliah tidak dilakukan dengan pem- berian nama yang bersifat urutan; misalnya, Composition I (2 sks), Composi- tion II (2 sks), dan Composition III (4 sks).

Langkah selanjutnya setelah mata kuliah telah disgmentasikan adalah pem- berian kode mata kuliah. Kodifikasi mata kuliah pada dasarnya bersifat bebas dan yang terpenting adalah bersifat unik. Bahan kajian lama pada sebuah mata kuliah dan sudah diberi kode tertentu, harus diberi kode baru bila nama mata kuliah tersebut berubah. Pemberian kode mata kuliah dapat menggunakan sis- tem kodifikasi yang terdiri atas dua huruf kapital dan empat digit angka. Misal- nya, HK 2032

- a. Kode prodi (misal HK: hukum)
- b. Digit ke-1 : penyajian mata kuliah pada semester (misal 2: semester 2)
- c. Digit ke-2&3: urutan mata kuliah di kegiatan semester (dua digit) (misal 03: nomor urut 03)
- d. Digit ke-4 : besaran sks (misal 2: bobot sks 2)

Dengan demikian dalam kurikulum program studi sudah tersajikan daftar mata kuliah, jumlah sks, dan kode mata kuliah. Agar kandungan kompetensi pada setiap mata kuliah dapat diidentifikasi, maka diperlukan untuk memberi infor- masi tentang unsur yang terkandung

dalam mata kuliah tersebut. Begitu pula, agar lebih mudah untuk mengatur kurikulum dan penyajiannya setiap mata kuliah juga perlu diberi notasi statusnya; wajib atau pilihan. Daftar mata kuliah, kode, jumlah sks pada kurikulum program studi dapat menggunakan format seperti yang terlihat pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4 Daftar nama mata kuliah, kode, jumlah sks, kompetensi dan statusnya dalam kurikulum program studi**

No.	Kode MK	Nama MK	sks	Status
1.				Wajib
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				Pilihan
10.				
...				
62				
	Jumlah		144	

Sementara itu, silabi untuk setiap mata kuliah harus dinyatakan secara jelas dengan muatan informasi yang terdiri atas CPL mata kuliah, isi pokok bahasan, cara evaluasi pencapaian CPL, dan daftar buku referensi utama yang bersifat wajib dan referesni tambahan yang bersifat pengayaan. Contoh pernyataan silabi untuk sebuah mata kuliah adalah yang berikut:

**SI 3102 Kreativitas dan Inovasi (2 sks)**

Mata kuliah ini bertujuan untuk membangun perilaku kreativitas dan memahami penerapannya dalam inovasi. Materi perkuliahan yang dipelajari mahasiswa meliputi konsep kreativitas, inovasi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan professional. Teknik pembelajaran yang digunakan meliputi belajar mandiri melalui e-learning, pengamatan di lapangan. Evaluasi ketercapaian CPL dilakukan melalui test pemahaman dan rancangan inovarif yang dituliskan dalam paper.

Untuk sub bahan kajian pada kompetensi merdeka belajar, kegiatan yang disebutkan di atas juga perlu dikerjakan. Bahan kajian sub bahan kajian, yang difasilitasi dengan pokok bahasannya secara utuh, selanjutnya dipecah menjadi mata kuliah yang dilengkapai dengan besaran sks yang tepat. Masing-masing mata kuliah dalam belajar

merdeka diuraikan deskripsinya secara singkat dalam bentuk silabi mata kuliah seperti dengan yang dituliskan dalam contoh di atas.

### *b. Kurikulum operasional*

Kurikulum operasional adalah sebaran mata kuliah pada setiap semester perkuliahan yang merupakan rencana program studi untuk menyajikannya kepada mahasiswa secara operasional. Pengelompokan mata kuliah dalam pembelajaran semester diusahakan sebagai bagian kompetensi yang memben- tuk CPL secara keseluruhan. Dalam pembelajaran setiap semester juga di- usahakan setiap mata kuliah mempunyai keterkaitan secara terintegrasi.

Tabel 4.5 Tabel kurikulum operasional program studi

SEMESTER 1				
No.	Kode MK	Nama MK	sks	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
Jumlah			18	

SEMESTER 2				
No.	Kode MK	Nama MK	sks	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
Jumlah			24	

Menyusun kurikulum operasional pada dasarnya adalah penetapan beban bela- jar mahasiswa pada setiap semester. Terdapat sejumlah prinsip dasar dalam menyusun kurikulum operasional, seperti yang



disebutkan berikut:

- a. Beban studi mahasiswa pada setiap semester ditetapkan maksimal sebesar 24 sks, dan beban studi mahasiswa pada semester 1 mengikuti rumus jumlah beban studi dalam kurikulum (144 sks) dibagi dengan jumlah semester (8 sem) yang dialokasikan; atau sebesar 18 sks.
- b. Beban studi mahasiswa pada semester selanjutnya ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh mahasiswa pada semester sebelumnya; namun, program studi diharuskan menyusunnya dengan beban studi semester sekitar 20-24 sks.
- c. Kelompok mata kuliah atau bahan kajian ‘dasar keilmuan’ disajikan sebelum kelompok mata kuliah ‘bahan kajian utama’; dan kelompok bahan kajian ‘penunjang’ yang berfungsi pengayaan disajikan setelah kelompok mata kuliah ‘bahan kajian utama’.
- d. Kelompok mata kuliah ‘bahan kajian misioner’ negara atau universitas bersifat mandiri dan bebas ditempatkan di semester mana saja; di awal semester, di tengah, atau di akhir semester.
- e. Mata kuliah Skripsi (untuk program Sarjana) sebaiknya ditempatkan di semester 7-8 dengan harapan setiap mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikannya secara tepat waktu atau menyelesaikannya pada semester 8.
- f. Mata kuliah konsentrasi (12 sks) atau belajar merdeka sebaiknya dialokasikan pada semester 6-7 dengan catatan CPL telah dikuasai oleh setiap mahasiswa sebesar 70%.

### ***i. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)***


Berdasarkan rancangan kurikulum operasional yang dibangun, program studi merancang penugasan kepada dosen pengajar untuk mengampunya pada setiap kegiatan semester. Setiap pengajar selanjutnya diberi tugas untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dengan acuan CPL yang dinyatakan dalam kurikulum, silabi mata kuliah, dan hasil analisis kompetensi mahasiswa yang telah mereka kuasai. Mata kuliah baru difungsikan untuk mengisi kompetensi tertentu yang melengkapi kompetensi mahasiswa sebelumnya agar menjadi lebih utuh dan komprehensif.

Dokumen RPS untuk setiap mata kuliah sebagai perangkat kurikulum sebaiknya disusun setiap penugasan semester. Dokumen RPS lama yang telah dilaksanakan difungsikan sebagai masukan untuk kelayakan dokumen RPS baru yang akan digunakan untuk mengajar mahasiswa yang baru pula. Keputusan menyusun dokumen RPS pada setiap penugasan semester dilakukan oleh dosen disebabkan karena analisis peserta didik yang baru dipastikan berbeda dengan

mahasiswa lama, bahan ajar ilmiah dipastikan terus berkembang dan setiap pengembangan ilmu pengetahuan harus diakomodasikan dalam RPS.

Format dan isi RPS sesuai dengan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020) sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Formulir Rencana Pembelajaran Semester**

 Program Studi ..... (S1) Fakultas ..... Universitas Borobudur <b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>							
Mata Kuliah		Kode Mata Kuliah		Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
1		2		3		4	5
Dosen Pengampu		1. 2.					
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi							
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)							
Deskripsi Mata Kuliah							
Evaluasi Pembelajaran		1. Kehadiran .... % 2. Kuis/Tugas Mandiri/Kelompok ....% 3. Ujian Tengah Semester .....% 4. Ujian Akhir Semester .....%					
Minggu Ke	Kemampuan Khusus (Sub CPMK)	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria, Penilaian dan Indikator	Bobot %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
....							
16							

Referensi Utama :

Referensi Pendukung :

Jakarta,..... 2021

Mengetahui,  
Ka.Prodi

Dosen

( )

( )

Keterangan:

1. **Nama program studi** : sesuai dengan nama program studi
2. **Nama dan kode, semester, sks mata kuliah/modul**: sesuai dengan kurikulum
3. **Nama dosen pengampu**: dapat diisi lebih dari satu orang
4. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan dirumuskan dalam CPMK**: CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terkait, terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Beberapa butir CPL yang dibebankan pada MK dapat direformulasikan kembali dengan makna yang sama dan lebih spesifik dan dinyatakan sebagai CPMK
5. **Deskripsi Mata kuliah**: uraian silabus mata kuliah sebagai pokok-pokok materi pembelajaran
6. **Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran (sub-CPMK)**: kemampuan tiap tahap pembelajaran dijabarkan dari capaian pembelajaran mata kuliah
7. **Bahan Kajian atau Materi Pembelajaran**: merupakan rincian dari bahan kajian atau beberapa bahan kajian dari mata kuliah terkait. Bahan kajian dapat berasal dari berbagai cabang/ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian yang dikembangkan oleh program studi. Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk buku ajar, modul, diktat, petunjuk praktikum, tutorial, referensi, monograf, podcast, video, atau bentuk lain yang setara. Materi pembelajaran dirancang dan disusun dengan memperhatikan keluasan dan kedalaman yang diatur dalam standar isi dan selalui diperbaharui sesuai perkembangan IPTEKS
8. **Bentuk pembelajaran dan Metode pembelajaran**: pemilihannya didasarkan pada kemampuan yang diharapkan suatu tahap pembelajaran sesuai CPL. **Bentuknya berupa**: kuliah, response, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, penelitian/riset/ membangun masyarakat/KKN tematik, pertukaran mahasiswa, magang/praktek kerja, asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan/atau bentuk lain yang setara. Sedangkan metode pembelajaran dapat berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode lain yang secara efektif dapat memfasilitasi pemenuhan CPL.
9. **Waktu pembelajaran**: perhitungan sks dan ekuivalensinya: sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler. Pengertian 1 sks untuk kuliah/responsi dll adalah 50 menit/mg/smt proses belajar, 60

menit/mg/smt penugasan terstruktur, dan 60 menit/mg/smt kegiatan mandiri (total 170 menit atau 2,83 jam). 1 sks seminar atau lainnya: 100 menit/mg/smt proses belajar dan 70 menit/mg/smt kegiatan mandiri (total 170 menit atau 2,83 jam). 1 sks untuk praktikum dan bentuk kegiatan MBKM lainnya adalah 170 menit/mg/smt.

10. **Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas:** pengalaman belajar yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa selama satu semester, termasuk di dalamnya kegiatan penilaian proses dan penilaian hasil belajar mahasiswa
11. **Kriteria, indikator dan bobot penilaian:** penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan. Kriteria menunjuk pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran, sedangkan indikator merupakan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja. Bobot penilaian merupakan ukuran dalam persen yang menunjukkan presentase penilaian keberhasilan satu tahap belajar terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah.
12. **Daftar referensi:** berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah

#### 4.2. Pemberlakuan kurikulum

Kurikulum program studi di lingkungan Universitas Borobudur dianggap valid dan sah apabila telah disahkan oleh Rektor. Melalui keputusan Rektor, sebuah kurikulum program studi ditetapkan berlaku dalam kurun waktu sesuai dengan jenjang pendidikan yang berikut.

- a. Program Diploma Tiga : 4 tahun
- b. Program Sarjana : 5 tahun
- c. Program Profesi : 4 tahun
- d. Program Magister : 4 tahun
- e. Program Doktor : 5 tahun

Dengan demikian, bila sebuah kurikulum program studi yang sudah habis masa berlakunya, maka program studi harus menyusun kembali secara menyeluruh, seperti kegiatan menyusun kurikulum baru. Peninjauan kurikulum bukan hanya mengganti, menggeser penyajian, atau mengganti silabi mata kuliah; tetapi membongkar kurikulum yang ada dan menggantinya dengan kurikulum yang baru.

Terdapat dua macam kebijakan pemberlakuan kurikulum lama sehubungan dengan diberlakukannya kurikulum baru.

- a. Phasing out: kebijakan ini berisi tentang penghapusan keberlakuan kurikulum lama secara bertahap. Misalnya, kurikulum baru hanya diberlakukan untuk mahasiswa baru dan/atau mahasiswa semester 2-4; sedangkan, mahasiswa lama (semester 5-8) tetap menggunakan

kurikulum lama.

- b. Transfer: kebijakan ini berisi tentang pemberlakuan kurikulum baru bagi semua mahasiswa baru atau mahasiswa lama. Perolehan nilai mata kuliah lama ditransfer ke dalam kurikulum baru. Kebijakan transfer dalam pemberlakuan kurikulum baru seharusnya tidak merugikan mahasiswa; misalnya, mata kuliah lama yang tidak ada dalam kurikulum baru harus dicarikan padanannya; sehingga, mahasiswa yang telah lulus mata kuliah lama

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dapat memilih di antara dua kebijakan di atas berdasarkan analisis kesiapan mahasiswa dan perangkat pendukungnya. Bagi program studi yang memiliki jumlah mahasiswa yang tidak terlalu banyak, kebijakan 'transfer' relatif lebih memungkinkan (*feasible*) dibandingkan dengan 'phasing out'. Untuk program studi yang jumlah mahasiswanya sangat banyak, kebijakan yang relatif tepat adalah 'phasing out' sebagaimana yang disebutkan di atas dengan pelaksanaan terbatas atau murni (sampai mahasiswa lama benar-benar habis).

#### **4.3. Administrasi pengesahan kurikulum**

Setiap kurikulum program studi yang disusun oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memerlukan pengesahan oleh Rektor agar bisa diimplementasikan sebagai kebijakan pembelajaran mahasiswa yang valid (sah). Sebelum disahkan oleh Rektor, kurikulum program studi yang baru tersebut belum bisa digunakan. Untuk itu, setelah sebuah kurikulum disusun, UPPS yang bersangkutan segera mengajukan ke Rektor untuk pengesahannya.

Prosedur pengesahan dokumen kurikulum mengikuti kegiatan yang tersebut di bawah ini.

- a. Kurikulum program studi telah disusun dalam sebuah dokumen yang lengkap sesuai yang diatur dalam buku pedoman ini.
- b. Fakultas mengirimkan surat permohonan pengesahan kurikulum yang ditujukan ke Rektor dengan melampirkan dokumen kurikulum program studi secara lengkap dan soft copy dokumen tersebut dalam file berformat Pdf.
- c. Rektor membentuk tim kecil yang terdiri atas Wark, penjaminan mutu, dan dosen pakar dengan keahlian pada bidang keilmuan terkait. Tugas tim kecil adalah untuk memastikan bahwa kurikulum yang disusun oleh program studi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- d. Tim kecil memberikan hasil kajian dan rekomendasi kepada Rektor yang selanjutnya dijadikan dasar untuk pengesahan kurikulum program studi.
- e. Rektor menerbitkan keputusan Rektor tentang pengesahan kurikulum program studi dan berikut masa berlakunya.

## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM

Kegiatan monitoring dan evaluasi untuk suatu program kegiatan sering ditempatkan sebagai kegiatan yang beriringan. Dalam kegiatan manajemen, monitoring dan evaluasi merupakan tahapan ujung yang difungsikan untuk mengumpulkan informasi tentang keefektifan desain program yang telah disusun dan pelaksanaannya di lapangan.

Evaluasi adalah sebuah upaya untuk melihat dan memberi nilai atas sesuatu; bila sesuatu itu adalah program atau tampilan maka kegiatannya disebut evaluasi program atau evaluasi tampilan (kinerja). Bila program kerja tersebut adalah pelaksanaan kurikulum, maka kegiatannya disebut dengan evaluasi kurikulum. Sesuai dengan namanya, evaluasi kurikulum ditujukan untuk memberi nilai keefektifannya sebagai perangkat pembelajaran mahasiswa untuk meraih CPL atau menjadi profil lulusan.

Berbeda dengan evaluasi yang ditujukan untuk memberi penilaian, kegiatan monitoring difungsikan untuk mengetahui sejauh mana program dalam kurikulum tersebut dilaksanakan secara berdisiplin. Melalui kegiatan monitoring akan diperoleh banyak informasi tentang pelaksanaan kurikulum program studi di lapangan dan informasi tersebut selanjutnya digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program.

#### 5.1. Monitoring

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kegiatan monitoring pada dasarnya adalah kegiatan amatan atau observasi terhadap pelaksanaan program kegiatan. Kurikulum program studi yang telah disusun pada dasarnya bisa juga disebut sebagai acuan perencanaan pembelajaran mahasiswa. Kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran mahasiswa tersebut dimonitor, dipantau, atau diobservasi untuk diketahui sejauh mana kegiatan tersebut mengikuti kebijakan pembelajaran yang direncanakan dalam kurikulum.

Dalam monitoring tidak hanya data pelaksanaan kebijakan yang terdapat dalam kurikulum saja yang harus dikumpulkan. Kegiatan lain di luar kebijakan tersebut yang bersifat turunan (*second order opportunity*) juga dikumpulkan; misalnya, kegiatan diskusi, praktek keterampilan secara terstruktur, penguasaan diri melalui sumber internet, dan lain-lainnya. Data dan informasi lingkungan juga penting untuk dikumpulkan dalam kegiatan monitoring, karena dukungan lingkungan secara nyata berkaitan erat dengan keberhasilan pembelajaran mahasiswa.

Aspek lain yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum di lapangan adalah kegiatan pengajaran dan dosen dan pembelajaran mahasiswa. Sehingga, dalam

beberapa hal keberhasilan kurikulum juga ditentukan oleh ketepatan dosen dalam memilih dan menggunakan metode pengajaran yang tepat, dan juga ditentukan oleh kesadaran mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh.

Dengan pertimbangan aspek yang disebutkan di atas, instrumen monitoring disusun secara terprogram. Kegiatan monitoring dilakukan setiap minggu dan hasilnya dilaporkan secara terstruktur dalam sebuah dokumen pelaporan. Dalam monitoring pelaksanaan kebijakan kurikulum program studi di lingkungan Universitas dan Akademi Borobudur, instrumen yang digunakan adalah yang berikut.

**Tabel 5.1 Instrumen monitoring pelaksanaan kurikulum program studi oleh UPPS**

No.	Indikator Kinerja Umum	Indikator Kinerja Khusus	Keberadaan		Nilai (%)
			ada	tidak	
1.	Perangkat	• RPS telah disusun oleh dosen secara berkualitas			
		• Kesesuaian RPS dengan silabi mata kuliah dalam kurikulum			
		• Mahasiswa mempunyai dokumen RPS yang disusun dosen.			
		• LCD untuk presentasi dalam ruang			
		• Penugasan mengajar dosen			
		• Ketersediaan dan kecukupan bandwidth untuk daring			
2.	Pelaksanaan	• Kesesuaian distribusi mata kuliah per semester			
		• Kesesuaian kegiatan pembelajaran pada setiap sesi perkuliahan dengan RPS			
		• Kedisiplinan dosen: kehadiran dan penyampaian materi ajar			
		• Penyajian latihan dan umpan balik setiap sesi perkuliahan			
		• Partisipasi mahasiswa: kehadiran dan kegiatan pembelajaran yang bermakna			
3.	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem akademik yang memotivasi mahasiswa untuk belajar maksimal</li> <li>• Tersedianya fasilitas pembelajaran yang mencukupi</li> </ul>			

No.	Indikator Kinerja Umum	Indikator Kinerja Khusus	Keberadaan		Nilai (%)
			ada	tidak	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Budaya belajar sesuai dengan ketentuan akademik yang kondusif</li> </ul>			
4.	Kegiatan lain di luar kebijakan kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>PA telah melaksanakan perannya dengan benar</li> <li>Mahasiswa melakukan kegiatan diskusi/seminar di luar kelas</li> <li>Mahasiswa mengakses materi ajar dari internet.</li> <li>Mahasiswa menggunakan fasilitas belajar MOOCs dan Free online courses sebagai pengayaan</li> </ul>			

## 5.2. Evaluasi

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa evaluasi adalah kegiatan penilaian atas keefektifan sebuah program. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kurikulum program studi, kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk memberi nilai keefektifan atas desain kurikulum yang telah disusun. Selanjutnya, nilai evaluasi dan sejumlah rekomendasinya dijadikan masukan untuk perbaikan pada desain kurikulum selanjutnya.

Kegiatan evaluasi pada dasarnya dilakukan pada saat setiap kali sebuah program selesai dilaksanakan. Bila sebuah kurikulum diasumsikan baru dapat dinilai tingkat keefektifannya setelah lulusan dihasilkan, maka pada program Sarjana selayaknya kegiatan evaluasi kurikulum dilaksanakan setelah berjalan 4 tahun; program Magister dan Doktor 2 tahun; dan program Diploma Tiga setelah 3 tahun. Evaluasi yang dilakukan pada akhir program ini dalam kajian evaluasi pada umumnya disebut sebagai evaluasi sumatif.

Namun, evaluasi juga bisa dilaksanakan secara formatif yakni memberi nilai pelaksanaan program setiap periode atau pada setiap fase. Misalnya, evaluasi kurikulum dilaksanakan dalam hitungan tahun penyelesaian sehingga kegiatan evaluasi kurikulum dilaksanakan pada setiap akhir tahun akademik.

Substansi penting yang menjadi sasaran evaluasi kurikulum meliputi tiga aspek; yakni, input, proses, dan output/outcome. Faktor input meliputi keberadaan dokumen kurikulum; apakah telah disusun sesuai standar. Kesiapan mahasiswa, dosen, dan penunjang infra struktur untuk pelaksanaan kurikulum juga termasuk faktor input. Faktor proses meliputi kegiatan pelaksanaan kegiatan pengajaran dan pembelajaran yang diatur dalam kurikulum; apakah sesuai dengan setiap butir yang diatur dalam kurikulum dan standar mutu yang ditetapkan. Faktor output/outcome meliputi kualitas nilai yang dihasilkan oleh kurikulum dan kinerja para lulusan; apakah telah memenuhi



dengan standar kompetensi lulusan dan memenuhi ciri-ciri profil lulusan sebagaimana yang ditetapkan dalam kurikulum.

Sebagai bahan evaluasi kurikulum sebagaimana dengan unsur yang disebutkan di atas, berikut adalah Tabel 5.2 yang dapat digunakan untuk pengumpulan data.

Tabel 5.2. Instrumen untuk pengumpulan data untuk evaluasi kurikulum program studi

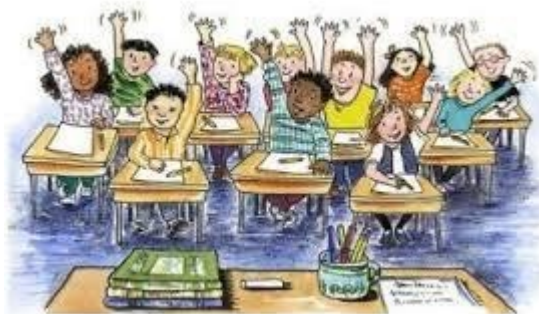
No.	Indikator Kinerja Umum	Indikator Kinerja Khusus	Keberadaan		Capaian (%)
			ada	tidak	
1.	Dokumentasi kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penamaan kurikulum</li> <li>• Identitas progeram studi</li> <li>• Deskripsi profil lulusan</li> <li>• Pernyataan SKL/CPL</li> <li>• Daftar bahan kajian dan sub bahan kajian</li> <li>• Uraian silabi mata kuliah</li> <li>• Kesesuaian distribusi mata kuliah per semester</li> </ul>			
2.	Perangkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RPS yang berkualitas</li> <li>• Sarana penunjang (LCD, Laptop, alat tulis)</li> <li>• Ketersediaan bandwidth</li> </ul>			
3.	Kesiapan dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penugasan mengajar dosen</li> <li>• Pemahaman dosen tentang desain kurikulum</li> <li>• Komitmen melaksanakan tugas mengajar</li> <li>• Keberadaan referensi materi ajar yang cukup dan relevan</li> <li>• Keterampilan pengelolaan pembelajaran e-learning</li> </ul>			
4.	Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan rencana pembelajaran (pengisian KRS)</li> <li>• Kadar motivasi berprestasi</li> <li>• Manajemen waktu untuk pembelajaran</li> <li>• Dukungan sosial dan finansial yang positif</li> </ul>			
5.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian duistribusi mata kuliah per semester</li> </ul>			

No.	Indikator Kinerja Umum	Indikator Kinerja Khusus	Keberadaan		Capaian (%)
			ada	tidak	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian RPS dengan silabi mata kuliah</li> <li>• Kedisiplinan dosen</li> <li>• Jumlah pertemuan 14 x</li> <li>• Jumlah kuiz</li> <li>• Partisipasi mahasiswa</li> </ul>			
6.	Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata-rata IPK</li> <li>• Jumlah lulusan tepat waktu</li> <li>• Jumlah mahasiswa DO</li> <li>• Tugas akhir dengan nilai tinggi (A)</li> </ul>			
7.	Outcome	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencapaian standar kompetensi lulusan</li> <li>• Kesesuaiannya dengan profil lulusan yang ditetapkan</li> </ul>			

### 5.3. Pelaporan

Data yang terkumpulkan melalui instrumen dengan sejumlah indikator pada kegiatan monitoring dan evaluasi, sebagaimana yang disebutkan di atas, dianalisis untuk diketahui tingkat keefektifan kurikulum. Kriteria yang digunakan sebagai penentunya adalah standar kualitas desain kurikulum yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman ini.

Hasil analisis dituliskan secara tersistem dalam sebuah laporan yang utuh dan diuraikan secara deskriptif berdasarkan indikator kinerja yang digunakan. Setiap permasalahan yang ditemukan pada indikator tertentu juga disebutkan, dibahas, dan dicarikan argumentasinya mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi. Atas permasalahan tertentu, solusinya ke depan dicoba untuk dihadirkan dan selanjutnya akan dijadikan rekomendasi. Kesimpulan dari hasil evaluasi harus berbentuk penilaian yang menyatakan apakah efektivitas kurikulum sangat tinggi, tinggi, sedang, atau rendah.



## BAB VI

### PENUTUP

Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum ini adalah dokumen yang memandu bagaimana setiap UPPS mengembangkan kurikulum program studi yang menjadi obyek pengelolaannya. Sebagai pedoman, yang diatur dalam dokumen ini adalah sebuah koridor yang memberi ruang bagi pengembang kurikulum dengan batasan tertentu. Menyusun kurikulum menggunakan pedoman ini seperti bergerak dalam terowongan untuk menuju ke sebuah ujung dengan memperhatikan dinding kiri atau kanan agar tidak tersesat.

Sehubungan dengan hal itu, diharapkan setiap UPPS benar-benar memahami isi pedoman ini agar dalam menyusun kurikulum program studi yang menjadi binaannya tidak tersesat. Sebuah kurikulum program studi harus disusun secara benar dan terarah ke satu titik yakni menciptakan profil lulusan yang difungsikan sebagai *learning outcome*. Kurikulum program studi tidak disusun dari memperhatikan bangunan kurikulum program studi yang disusun oleh perguruan tinggi lain tetapi melalui pemikiran yang jernih, jelas, dan usaha keras.

Desain kurikulum dan bentuk dokumentasinya pada dasarnya adalah sosok nyata dari sebuah program studi. Desain kurikulum yang acak-acakan mencerminkan sosok program studi yang tidak rapi dan serampangan. Untuk itu, setiap UPPS di lingkungan Universitas dan Akademi Borobudur dalam menyusun kurikulum program studi yang merupakan tanggung jawabnya diharapkan dapat menyusunnya secara berdisiplin, taat azaz dengan standar mutu yang ditetapkan, dan efektif.



